



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 19 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA AKSI PENERAPAN EKONOMI HIJAU TAHUN 2025 – 2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (4), Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Ekonomi Hijau, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Penerapan Ekonomi Hijau Tahun 2025 – 2029;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Ekonomi Hijau (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI PENERAPAN EKONOMI HIJAU TAHUN 2025 – 2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Ekonomi Hijau adalah ekonomi rendah karbon, efisien dalam sumber daya, dan inklusif secara sosial yang menghasilkan peningkatan kesejahteraan manusia dan keadilan sosial, untuk mengurangi risiko lingkungan dan kelangkaan ekologi secara signifikan.
2. Rencana Aksi Penerapan Ekonomi Hijau adalah dokumen perencanaan sebagai pedoman dalam upaya melaksanakan strategi pembangunan dengan mengintegrasikan konsep ekonomi hijau dalam program dan kegiatan pembangunan daerah.
3. Tim Kerja Ekonomi Hijau adalah wadah koordinasi bagi pelaksana kegiatan ekonomi hijau dari berbagai instansi/lembaga di Daerah Istimewa Yogyakarta.
4. Masyarakat adalah orang perseorangan atau badan usaha yang berdomisili dan/atau menjalankan usahanya di Daerah Istimewa Yogyakarta.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
7. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
8. Daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Rencana Aksi Penerapan Ekonomi Hijau sebagai pedoman melaksanakan strategi pembangunan berkelanjutan yang mengintegrasikan konsep ekonomi hijau menjadi satu kesatuan dimensi integral dengan visi dan misi pembangunan Daerah agar selaras dan sinkron dengan karakter Daerah yang implementatif dan terukur.
- (2) Tujuan disusunnya Rencana Aksi Penerapan Ekonomi Hijau untuk:
 - a. memberikan landasan hukum bagi Perangkat Daerah dalam menyusun kebijakan, program dan kegiatan dari tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan yang berkelanjutan;
 - b. mengefektifkan penerapan Ekonomi Hijau secara lebih konkrit dan terarah guna menjamin tercapainya sasaran utama pembangunan berkelanjutan dan pelestarian lingkungan; dan
 - c. memperkuat sistem dan komitmen Perangkat Daerah dalam mengimplementasikan Ekonomi Hijau.

BAB II

PELAKSANAAN RENCANA AKSI

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah dalam rangka menerapkan konsep Ekonomi Hijau menyusun Rencana Aksi Penerapan Ekonomi Hijau.
- (2) Ruang lingkup Rencana Aksi Penerapan Ekonomi Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup 3 (tiga) pilar yaitu:
 - a. lingkungan;
 - b. ekonomi; dan
 - c. sosial.

- (3) Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Ekonomi Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada:
 - a. dokumen perencanaan pembangunan nasional; dan
 - b. dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Pasal 4

- (1) Rencana Aksi Penerapan Ekonomi Hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. isu strategis;
 - b. sasaran;
 - c. program kegiatan lintas sektor;
 - d. target; dan
 - e. pihak yang terlibat.
- (2) Rencana Aksi Penerapan Ekonomi Hijau Daerah Tahun 2025 – 2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

- (1) Rencana Aksi Penerapan Ekonomi Hijau dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan Masyarakat.
- (2) Pelaksanaan Rencana Aksi Penerapan Ekonomi Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengimplementasikan ke dalam program, kegiatan, dan aktivitas pembangunan yang mendukung pencapaian target indikator ekonomi hijau.

BAB III
PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Tim Kerja Ekonomi Hijau

Pasal 6

- (1) Gubernur dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi penerapan Rencana Aksi Ekonomi Hijau membentuk Tim Kerja Ekonomi Hijau.
- (2) Tim Kerja Ekonomi Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan Perangkat Daerah terkait.
- (3) Pembentukan Tim Kerja Ekonomi Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Kedua
Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 7

- (1) Tim Kerja Ekonomi Hijau melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Aksi Penerapan Ekonomi Hijau.
- (2) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Aksi Penerapan Ekonomi Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Aksi Penerapan Ekonomi Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan tahun berikutnya.

Bagian Ketiga

Pelaporan

Pasal 8

- (1) Setiap Perangkat Daerah yang melaksanakan Rencana Aksi Penerapan Ekonomi Hijau Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2025 – 2029 melaporkan capaian kegiatan Rencana Aksi Penerapan Ekonomi Hijau kepada Perangkat Daerah yang memiliki tugas fungsi pendukung perumusan kebijakan strategis bidang perekonomian melalui tim.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Perangkat Daerah yang memiliki tugas fungsi pendukung perumusan kebijakan strategis bidang perekonomian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan capaian Rencana Aksi Penerapan Ekonomi Hijau kepada Gubernur.

BAB IV

PENDANAAN

Pasal 9

Pendanaan terhadap pelaksanaan Rencana Aksi Penerapan Ekonomi Hijau Tahun 2025-2029 bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 22 Mei 2025

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 22 Mei 2025

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

BENY SUHARSONO

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2025 NOMOR 20

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



Hary Setiawan, S.H., M.H.

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA
NOMOR 19 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA AKSI PENERAPAN EKONOMI
HIJAU TAHUN 2025 – 2029

RENCANA AKSI EKONOMI HIJAU
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN 2025 – 2029

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam dua dekade terakhir, dampak dari kerusakan lingkungan, pemanasan global (*global warming*) dan perubahan iklim (*climate change*) kian serius. Terlebih, hal tersebut menimbulkan dampak negatif yang luar biasa bagi kehidupan umat manusia. Seperti banjir, rob, pencemaran udara, air dan tanah, perubahan iklim yang ekstrem, perubahan cuaca yang ekstrim, dan lainnya terjadi di mana-mana. Sejumlah hasil studi menunjukkan peningkatan pemanasan global dan perubahan iklim yang disebabkan oleh semakin meluasnya kerusakan lingkungan yang di berbagai negara, termasuk di Indonesia dan khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Lingkungan hidup termasuk sumber daya alam punya kemampuan untuk pulih kembali (*recovery*), namun tekanan aktifitas manusia yang semakin ekstrem dibandingkan dengan laju pemulihan yang lambat, akan mengakibatkan degradasi bahkan kerusakan sumber daya alam. Pergerakan upaya perusakan yang dilakukan oleh manusia lebih cepat daripada kemampuan alam untuk melakukan pemulihan kembali (*recovery*). Tekanan penduduk yang tidak sebanding dengan ketersediaan sumber daya alam tentu saja akan memperlambat pemulihan sumber daya alam.

Kegiatan pembangunan ekonomi di Indonesia lebih banyak berbasis pada ekstraksi sumber daya alam, mengingat Indonesia memiliki sumber daya alam yang relatif lebih banyak dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Sebut saja minyak bumi, gas bumi, batu bara, timah, emas, dan sumber daya alam lainnya. Hal inilah yang menyebabkan aspek perlindungan dan pelestarian lingkungan

masih sering kali terabaikan sehingga menimbulkan beragam permasalahan lingkungan, seperti pencemaran air dan/atau udara, kerusakan kualitas tanah, kebakaran dan kerusakan hutan, alih fungsi lahan pertanian dan sebagainya. Kondisi demikian pada akhirnya menjadikan semakin menurunnya produktivitas sumber daya alam dan lingkungan sehingga mendorong timbulnya kantong-kantong kemiskinan pada masyarakat yang hidupnya bergantung pada sumber daya alam dan lingkungan tersebut.

Pembangunan yang dilakukan di berbagai sektor di DIY dalam beberapa tahun ini teridentifikasi juga telah menyebabkan permasalahan lingkungan. Sektor industri di DIY menghadapi beberapa permasalahan yang harus diselesaikan agar kontribusi sektor industri terus terjaga. Secara umum, permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan industri di DIY adalah ketersediaan bahan baku industri yang tergantung dari luar daerah; persaingan pada pasar domestik dan internasional yang semakin kompetitif; ketersediaan lahan yang terbatas, belum tersedia daya dukung kawasan industri secara memadai; dan kualitas sumber daya manusia yang belum memenuhi budaya industri yang kompetitif dan inovatif(dokumen valuasi jasa lingkungan 2021).

Pada periode 2013-2017, meskipun sektor industri masih menjadi sektor yang memiliki kontribusi (*share*) terbesar dalam pembentukan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) riil di DIY, namun ada kecenderungan besarnya kontribusi mengalami penurunan. Subsektor industri yang menyumbang nilai terbesar adalah sektor industri makanan dan minuman; kemudian industri tekstil dan pakaian jadi; industri barang dari logam; dan industri furnitur. Isu dan tantangan kinerja perindustrian adalah dampak pencemaran air tanah yang disebabkan karena pembuangan limbah. Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup No. 2/MENKLH/1988 menjelaskan bahwa pencemaran adalah masuknya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam air/udara, dan/atau berubahnya (komposisi) air/udara oleh kegiatan manusia atau proses alam. Hal tersebut berdampak terhadap menurunnya kualitas udara dan air.

Berdasarkan kajian valuasi jasa lingkungan tahun 2021 diketahui pada tahun 2019 terdapat 763.101,05 ton sampah di DIY dengan klasifikasi jumlah sampah terkelola pada kategori pengurangan sebesar 187.394,56 ton dan 249.129,23 ton pada kegiatan penanganan. Lebih lanjut, pada tahun 2020 terjadi peningkatan jumlah sampah menjadi 783.625,45 ton dengan kegiatan pengurangan sebanyak 194.606,80 ton dan kegiatan penanganan sebanyak 226.909,85 ton. Adapun jumlah sampah tidak terkelola sebanyak 362.135,80 ton.

Berdasarkan kajian valuasi jasa lingkungan tahun 2021, indikator lingkungan hidup DIY khususnya emisi CO₂ dari penggunaan energi tahun 2015- 2017, menunjukkan tren yang terus meningkat. Emisi CO₂ tumbuh dari 2,80 MT (Juta

Ton) CO₂ pada tahun 2015 menjadi 3,20 MT pada tahun 2017. Emisi per kapita tumbuh dari 0,76 Ton CO₂/kapita pada tahun 2015 menjadi 0,85 Ton CO₂/kap pada tahun 2017. Adapun emisi per PDRB tumbuh dari 33,53 Ton CO₂/Milyar Rupiah pada tahun 2015 menjadi 34,44 Ton CO₂/Juta Rupiah pada tahun 2017. Potensi buangan limbah di DIY pada tahun 2019 mencapai 147.280.368.900 lt/org/tahun dan terjadi penurunan pada tahun 2020 dengan potensi buangan limbah menjadi 140.603.655.675 lt/orang/tahun. Potensi buangan limbah tertinggi berada di Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman, dengan potensi buangan limbah sebanyak 103.505.850 liter/orang/hari dan 118.209.420 lt/orang/hari pada tahun 2020.

Pertumbuhan jumlah hotel di DIY sejak tahun 2016-2021 meningkat dengan rata-rata penambahan 10-15 hotel dalam setahun. Pertambahan hotel yang cukup massive sebelum tahun 2016 di Kota Yogyakarta berdampak pada isu keringnya air bawah tanah yang berada di sekitar hotel. Kondisi ini menyebabkan adanya moratorium pemberhentian sementara pembangunan hotel di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dalam konsep ekonomi tujuan utama pembangunan adalah memacu pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Sumber daya alam diperlukan sebagai bahan baku, sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan produksi nasional. Karena hanya berfungsi sebagai sarana, bukan tujuan pembangunan, dalam hal ini terjadi pertentangan antara kepentingan “pembangunan” dengan “kelestarian alam dan lingkungan” maka kelestarian sumberdaya alam termasuk yang harus “dikorbankan”. Sumber Daya alam itu justru dieksploitasi dan dimanfaatkan sebanyak-banyaknya untuk akumulasi modal dan demi pertumbuhan ekonomi. Kelestarian sumberdaya alam merupakan trade off dari pembangunan ekonomi. Kerusakan lingkungan dianggap sebagai “biaya” yang harus dibayar untuk “manfaat” pembangunan ekonomi yang diperoleh masyarakat. Prinsip trade off ini menegaskan perlunya memilih hanya salah satu kebijakan saja: “pembangunan ekonomi” atau “lingkungan”. Tidak bisa keduanya, karena pilihan yang satu bisa menghapus manfaat pilihan yang lain. Bahwa eksploitasi dan pemanfaatan kekayaan alam itu menimbulkan dampak kerusakan ekosistem dan bencana lingkungan, hal itu dianggap konsekuensi masalah yang tidak bisa dihindari.

Konsep tentang perlunya faktor non-ekonomi – khususnya faktor sosial dan lingkungan – dalam pembangunan baru dianggap penting untuk diperhatikan setelah konsep “pembangunan berkelanjutan (sustainable development)” ramai menjadi wacana global. Sebagai antithesis dari konsep “pembangunan ekonomi” (menilai pembangunan dari pertumbuhan ekonomi semata) yang menimbulkan berbagai masalah keadilan sosial dan bencana lingkungan itu, konsep “pembangunan berkelanjutan” menolak prinsip trade off dan menawarkan prinsip

“sinergi” dalam proses dan pola pembangunan yang kompleks dan multidimensional.

Dalam pola “pembangunan berkelanjutan”, negara harus menjalankan pembangunan ekonomi, sosial dan lingkungan secara seimbang, simultan, selaras dan berkelanjutan dalam jangka panjang. Tidak ada trade off antara pembangunan ekonomi dengan pelestarian lingkungan ataupun dengan keadilan sosial. Komitmen pemerintah terhadap Ekonomi Hijau telah ditetapkannya dalam Nawa Cita (Sembilan agenda prioritas), RPJPN 2005 – 2025, dan “Millenium Development Goals (MDGs)” menjadi “Sustainable Development Goals (SDGs)” sebagai agenda pembangunan global untuk mencapai “Tujuan Pembangunan Berkelanjutan” pada tahun 2030.

Dalam perkembangannya, dengan semakin gencarnya gerakan pembangunan berkelanjutan, kemudian muncul konsep ekonomi hijau yang menjadi penguat konsep pembangunan berkelanjutan. Menurut United Nations Environment Programme, ekonomi hijau adalah suatu cara mewujudkan pembangunan ekonomi secara inklusif yang menghasilkan kesejahteraan manusia dan keadilan sosial yang lebih baik dan pada saat yang sama mengurangi resiko kerusakan lingkungan hidup dan kelangkaan ekologis secara signifikan (UNEP, 2011: Green Economy Report).

Rencana Aksi Daerah Ekonomi Hijau (RAD-EH) memiliki posisi yang strategis di dalam pembangunan ekonomi, lingkungan dan sosial. RAD-EH menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah untuk menentukan prioritas kegiatan dan berbagai kegiatan lainnya yang lebih efektif dan berbasis bukti. Selain itu juga menjadi alat advokasi untuk menjelaskan pentingnya penerapan Ekonomi Hijau kepada para pengambil kebijakan, menggalang komitmen perangkat daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam perencanaan dan pelaksanaan Ekonomi Hijau, serta sebagai arahan untuk menyiapkan perencanaan dan penganggaran yang baik di daerah sehingga sesuai dengan prioritas nasional dan daerah.

Sebagai terjemahan dari perencanaan pusat dan daerah, maka kedudukan RAD-EH di daerah sama penting sesuai dengan amanat Perda No 1 Tahun 2024. RAD-EH disusun menyesuaikan kebutuhan daerah, sejalan dengan Perda dan Pergub dan juga RPJMD di daerah. Dengan demikian kedudukan RAD-EH akan menjadi strategis khususnya dalam aspek pembangunan ekonomi, lingkungan serta sosial. Selain itu program dan kegiatan dalam RAD-EH hendaknya mudah diterapkan di lapangan dan keberhasilannya dapat diukur serta didukung oleh pendanaan yang memadai.

B. Tujuan Rencana Aksi Daerah Ekonomi Hijau

Tujuan umum dari penyusunan ini sebagai panduan dan acuan bagi para pemangku kepentingan baik instansi pemerintah di tingkat provinsi dan

kabupaten/kota, swasta, BUMN/BUMD, perguruan tinggi, serta masyarakat pada umumnya dalam menjabarkan lebih lanjut secara terintegrasi, terkoordinasi, dan sinergis berbagai kegiatan nyata untuk mewujudkan Ekonomi Hijau di DIY.

Secara khusus, tujuan dari penyusunan dokumen RAD-EH tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemahaman seluruh pemangku kepentingan terkait dan masyarakat dalam peran sertanya untuk penerapan Ekonomi Hijau.
2. Meningkatkan kemampuan menganalisis perkembangan situasi ekonomi hijau di setiap wilayah agar: (i) mampu menetapkan prioritas penerapan pilar dan indikator pencapaian indek ekonomi hijau; (ii) mampu memilih intervensi yang tepat sesuai kebutuhan lokal; dan (iii) mampu membangun dan memfungsikan lembaga yang dapat mendukung penerapan ekonomi hijau; dan (iv) mampu memantau dan mengevaluasi penerapan ekonomi hijau.
3. Mengintegrasikan dan menyelaraskan program atau kegiatan terkait penerapan ekonomi hijau secara terpadu untuk diimplementasikan dengan terinci dan jelas untuk membangun sinergi, integrasi, dan koordinasi yang baik.
4. Meningkatkan komitmen pemangku kepentingan mulai dari perencanaan, implementasi dan evaluasi atas pelaksanaan bidang tugas masing-masing dalam rangka mencapai tujuan yaitu mewujudkan tercapainya Indeks Ekonomi Hijau yang berkelanjutan di Provinsi DIY dan pemerintah Kabupaten/Kota.
5. Membangun dan mengoptimalkan lembaga yang mendukung penerapan Ekonomi Hijau di DIY.
6. Sebagai panduan bagi kabupaten/kota dalam menyusun RAD-EH.

BAB II

KONDISI EKSISTING, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

A. Kondisi Geografis DIY

A.1. Letak, Luas, dan Batas Wilayah

Secara astronomis, DIY terletak di antara 7o33'-8o12' Lintang Selatan dan 110o00'- 110o50' Bujur Timur sedangkan secara geografis, DIY berada di bagian tengah Pulau Jawa sebelah Selatan dan berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah, yaitu sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Magelang, di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Klaten dan Kabupaten Wonogiri, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Purworejo dan sebelah selatan dengan Samudra Hindia.

A.2. Topografi

Topografi merupakan bentuk permukaan suatu lahan yang dikelompokkan berdasarkan perbedaan ketinggian (amplitude) dari permukaan bumi (bidang datar) suatu bentuk bentang lahan (landform). Adapun peta topografi DIY diuraikan sebagai berikut:

a. Kemiringan Lahan

Menurut data dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) DIY, kemiringan lahan di DIY dikelompokkan menjadi empat bagian, yaitu lahan dengan kemiringan 0-2% seluas 1.223,47 km², lahan dengan kemiringan 3-15% seluas 767,46 km², lahan dengan kemiringan 16-40% seluas 806,17 km², dan lahan dengan kemiringan lebih dari 40% seluas 388,21 km².

b. Ketinggian Lahan

Sebagian besar dari luas wilayah DIY, yaitu sebesar 65,65% wilayah terletak pada ketinggian antara 100-499 m dpl, 28,84% wilayah dengan ketinggian kurang dari 100 m dpl, 5,04% wilayah dengan ketinggian antara 500-999 m dpl, dan 0,47% wilayah dengan ketinggian di atas 1000 m dpl.

B. Potensi Ekonomi Hijau

B.1. Potensi Sumber Daya Wilayah Pesisir

Wilayah pesisir DIY yang meliputi wilayah Kabupaten Kulon Progo, Bantul, dan Gunungkidul memiliki berbagai potensi yang dapat dimanfaatkan. Potensi tersebut antara lain:

a. Perikanan tangkap laut

Kondisi perikanan tangkap di selatan Jawa mempunyai nilai potensi lestari sebesar 320.000 ton/tahun. Sumberdaya perikanan yang potensial di DIY meliputi berbagai jenis ikan pelagis besar dan kecil, ikan demersal, serta ikan karang. Jenis ikan pelagis kecil yang potensial meliputi ikan layang dan ikan kembung. Sementara untuk ikan jenis pelagis besar, diantaranya madidihang dan cakalang. Selain itu, untuk jenis ikan demersal yang nilai produksinya besar adalah ikan layur dan ikan manyung. Di sisi lain, untuk jenis ikan karang yang potensinya besar diantaranya ikan ekor kuning/pisang- pisang dan ikan kerapu karang. Beberapa jenis lain yang nilai produksinya tinggi dan potensial untuk dimanfaatkan adalah udang jerbung, kepiting, cumi-cumi dan gurita.

Potensi sumber daya perikanan laut yang besar tersebut masih belum sebanding dengan tingkat pemanfaatannya. Hingga saat ini tingkat pemanfaatannya masih sekitar 2%. Hal ini berarti terjadi underfishing karena pemanfaatannya masih jauh berada di bawah potensi. Oleh karena itu, potensi sumberdaya perikanan di selatan DIY masih terbuka luas untuk dimanfaatkan.

Sementara, bila dilihat lebih luas, DIY berada dalam Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 573 yang mencakup 8 Provinsi yang meliputi selatan Jawa hingga Nusa Tenggara dengan total potensi 491.700 ribu ton/tahun. Dengan sifat laut yang open access, maka peningkatan kapasitas nelayan DIY diharapkan dapat meningkatkan pemanfaatan potensi sumberdaya ikan yang lebih luas pula.

b. Ekosistem terumbu karang

Terdapat 7 lokasi yang memiliki ekosistem terumbu karang di DIY yang semuanya terdapat di perairan Kabupaten Gunungkidul. Ekosistem terumbu karang tersebut terdapat di Pantai Ngrehnan, Pantai Gesing, Pantai Ngandong, Pantai Baron, Pantai Drini, Pantai Nglambor, dan Pantai Wediombo. Tutupan karang keras hidup di semua lokasi, namun hanya di Pantai Wediombo yang kondisinya tutupannya relatif lebih baik.

c. Ekosistem Mangrove

Hutan mangrove merupakan komunitas tumbuhan yang khas berada di daerah tropis sepanjang pantai yang terlindung atau berada di muara sungai, sering disebut sebagai hutan bakau, hutan payau, atau hutan pasang surut dan merupakan suatu ekosistem antara darat dan

laut. di dalam hutan mangrove, perairan dan tanah di bawahnya merupakan habitat berbagai satwa dan biota perairan. luas hutan mangrove di DIY pada tahun 2012 seluas 61 ha.

Mangrove di DIY tersebar di beberapa lokasi yang dapat dijumpai dengan membentuk suatu ekosistem maupun dalam kelompok-kelompok (spot) yang kecil. Berdasarkan hasil pengamatan dan identifikasi di lokasi pendataan, ditemukan 12 spesies mangrove teridentifikasi di kawasan pesisir Kabupaten Kulonprogo dan Kabupaten Bantul, yang terdiri dari 6 komponen mangrove mayor (*Avicennia marina*, *Avicennia alba*, *Rhizophora stylosa*, *Rhizophora mucronata*, *Sonneratia caseolaris* dan *Nypa fruticans*) dan 6 komponen mangrove asosiasi (*Acanthus ilicifolius*, *Hibiscus tiliaceus*, *Ipomoea pes-caprae*, *Pandanus tectorius*, *Sesuvium portulacastrum* dan *Terminalia cattapa*).

d. Ekosistem Gumuk Pasir

Di pesisir Parangtritis terbentuk gumuk pasir aeolian tipe barkhan yang jarang dijumpai di wilayah iklim tropika basah. Gumuk pasir di Parangtritis bahkan merupakan satu-satunya daerah tropis yang terbentuk barkhan. Gumuk pasir terbentuk dari pasir yang terbawa ke laut oleh Kali Opak dari material vulkanik hasil letusan Gunungapi Merapi.

Ekosistem gumuk pasir dijadikan sebagai habitat oleh berbagai hewan dan tumbuhan. Tumbuhan dapat hidup pada wilayah gumuk pasir karena gumuk pasir menyimpan cadangan air lensas yang cukup banyak. Tumbuhan yang tumbuh secara alami di kawasan gumuk pasir antara lain adalah rumput katang-katang, kaktus, bunga tapak dara, siwalan, rumput alang-alang, pandan, dan leresede. Lebatnya tumbuhan pada bagian barat gumuk pasir menjadikan gumuk pasir ditempati oleh berbagai hewan khususnya burung. Berbagai macam aktivitas kebudayaan juga dapat ditemukan di kawasan gumuk pasir dan sekitarnya. Keterdapatannya situs budaya yang ada di kawasan ini menjadikan salah satu magnet kegiatan budaya di kawasan ini. Berdasarkan hasil identifikasi lapangan, terdapat 15 situs alam dan budaya yang terdapat di sekitar kawasan gumuk pasir Kecamatan Kretek. Hal ini membuktikan bahwa gumuk pasir selain memiliki keunikan alam juga memiliki peranan yang penting dalam kegiatan budaya.

e. Pariwisata

Destinasi wisata yang banyak terdapat di pesisir dan pulau-pulau kecil DIY sebagian besar didominasi oleh wisata pantai. Terdapat 70 wisata pantai di DIY yang terdiri dari 60 pantai di Kabupaten Gunungkidul, 6 pantai di Kabupaten Bantul, dan 4 Pantai Kabupaten

Kulonprogo yang sering dikunjungi wisatawan nusantara atau wisatawan mancanegara. Dalam Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan DIY Tahun 2012-2025 ditetapkan perwilayahan pembangunan destinasi wisata pesisir, yaitu Kawasan Glagah-Trisik dan sekitarnya; Kawasan Parangtritis-Depok dan sekitarnya; Kawasan Baron-Sundak dan sekitarnya; serta Kawasan Siung-Wediombo-Sadeng dan sekitarnya.

f. Energi Baru Terbarukan

Beberapa potensi energi alternatif yang dapat dikembangkan di wilayah pesisir DIY antara lain Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH), Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), serta Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB). Potensi tenaga air di DIY yang dapat dimanfaatkan untuk PLTMH mencapai 763,6 Kw. Potensi intensitas radiasi matahari mencapai 4,5kWh/m² dengan potensi radiasi maksimum terjadi pada jam 10.00 - 14.30 hampir diseluruh wilayah untuk pengembangan PLTS. Kapasitas potensi PLTB di sepanjang pantai Yogyakarta mencapai 10 MW dengan kecepatan angin sebesar 2,5 – 4 m/s, sedangkan di Sundak, Srandakan, Baron dan Pantai Samas kapasitas potensi PLTB mencapai 10 hingga 100 MW dengan kecepatan angin sebesar 4-5 m/s. Selain itu, energi gelombang laut juga dapat dimanfaatkan sebagai salah satu sumber energi alternatif, terutama di kecamatan Saptosari.

B.2. Potensi Pengembangan Wilayah

Potensi pengembangan wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan Peraturan Daerah DIY Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) DIY, berada pada kawasan budidaya dan kawasan strategis provinsi. Berdasarkan kajian peninjauan Perda DIY No 2 Tahun 2010 tentang RTRW DIY, potensi pengembangan wilayah sesuai dengan rencana pola ruang kawasan budidaya terdiri dari : kawasan peruntukan hutan produksi, kawasan peruntukan pertanian, kawasan peruntukan perkebunan, kawasan peruntukan perikanan, kawasan peruntukan pertambangan, kawasan peruntukan industri, kawasan peruntukan pariwisata, kawasan peruntukan permukiman, dan kawasan peruntukan budidaya lainnya. Sedangkan potensi pengembangan wilayah sesuai dengan kawasan strategis provinsi terdiri atas: kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya, kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi, kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, dan kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi.

Kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan sosial dan budaya terdiri atas kawasan strategis kasultanan dan kawasan strategis kadipaten.

kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan ekonomi terdiri atas Kawasan Perkotaan Yogyakarta, Kawasan Temon- Prambanan, Kawasan Tempel-Parangtritis, dan Kawasan Pantai Selatan DIY. Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup terdiri atas Kawasan Bentang Alam Karst dan Kawasan Gumuk Pasir Parangtritis. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi terdiri atas Kawasan Pantai Selatan untuk Pembangkit Listrik Tenaga Bayu dan Gelombang Laut di Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul, dan Kabupaten Gunungkidul.

Wilayah rawan bencana DIY sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah DIY Nomor 2 tahun 2010 tentang RTRW DIY, meliputi:

- a. Kawasan rawan bencana letusan gunung berapi di lereng Gunung Merapi Kabupaten Sleman. Bencana alam Gunung Merapi mengancam wilayah Kabupaten Sleman bagian utara dan wilayah-wilayah sekitar sungai yang berhulu di puncak Merapi.
- b. Kawasan rawan bencana tanah longsor di Kabupaten Sleman, Bantul, Kulon Progo, dan Gunungkidul. Gerakan tanah/batuan dan erosi, berpotensi terjadi pada lereng Pegunungan Kulon Progo yang mengancam di wilayah Kulon Progo bagian utara dan barat, serta pada lereng Pegunungan Selatan (Baturagung) yang mengancam wilayah Kabupaten Gunungkidul bagian utara dan bagian timur wilayah Kabupaten Bantul.
- c. Kawasan rawan bencana banjir di Kabupaten Bantul, dan Kulon Progo. Banjir terutama berpotensi mengancam daerah pantai selatan Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Bantul.
- d. Kawasan rawan bencana kekeringan di Kabupaten Bantul, Gunungkidul, Sleman dan Kulon Progo. Bahaya kekeringan berpotensi terjadi di wilayah Kabupaten Gunungkidul bagian selatan, khususnya pada kawasan bentang alam *karst*.
- e. Kawasan rawan bencana angin topan. Bencana alam akibat angin topan berpotensi terjadi di wilayah pantai selatan Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul, dan daerah-daerah Kabupaten Sleman bagian utara, serta wilayah perkotaan Yogyakarta.
- f. Kawasan rawan gempa bumi di kabupaten/kota. Gempa bumi tektonik berpotensi terjadi karena wilayah DIY berdekatan dengan kawasan tumbukan lempeng (*subduction zone*) di dasar Samudra Indonesia yang berada di sebelah selatan DIY. Disamping itu, secara geologi di wilayah DIY terdapat beberapa patahan yang diduga aktif. Wilayah dataran rendah yang tersusun oleh sedimen lepas, terutama

hasil endapan sungai, merupakan wilayah yang rentan mengalami guncangan akibat gempa bumi.

- g. Kawasan rawan tsunami di sepanjang pantai di Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, dan Kabupaten Gunungkidul (khususnya pada pantai dengan elevasi (ketinggian) kurang dari 30 m dari permukaan air laut).
- h. Kawasan rawan abrasi di semua daerah pantai di Kabupaten Gunungkidul, Bantul, dan Kulon Progo baik pantai tebing maupun pantai pasir.

Potensi bencana yang disebabkan oleh faktor manusia/sosial di DIY antara lain konflik antar kelompok masyarakat dan terorisme. Sementara itu, potensi bencana yang disebabkan oleh faktor non-alam antara lain, gagal teknologi, epidemi, wabah penyakit, dampak industri dan pencemaran lingkungan. Namun demikian frekuensi dan kerawanan bencana yang disebabkan oleh faktor manusia/sosial dan non alam, selama ini masih relatif kecil.

B.3. Potensi Demografi

Berdasarkan hasil Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota provinsi D.I. Yogyakarta 2010-2035, jumlah penduduk DIY tahun 2021 tercatat 3.712.896 jiwa, dengan persentase jumlah penduduk laki-laki 49,53 persen dan penduduk perempuan 50,47 persen.

Tabel 1. Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di D.I. Yogyakarta, 2000, 2010 dan 2021

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Laju Pertumbuhan Penduduk Per Tahun Annual Population Growth Rate (%)		
	2000-2010	2010-2020	2020-2021
Kulon Progo	0,48	1,12	2,11
Bantul	1,56	0,76	1,75
Gunung Kidul	0,07	0,98	1,97
Sleman	1,94	0,29	1,27
Yogyakarta	-0,21	-0,38	0,98
D.I.Yogyakarta	0,76	0,58	1,61

B.4. Potensi Sektor Pertanian

Sektor pertanian merupakan sektor yang cukup penting dalam memenuhi indikator ekonomi hijau. Sektor pertanian menunjukkan seberapa besar kemampuan daerah dalam menopang sumber daya pangan. Berikut disajikan luas panen dan produktivitas padi di DIY.

Tabel 2. Luas Panen, Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi Padi
Menurut Kabupaten/Kota di D.I Yogyakarta, 2021

Kabupaten/Kota <i>Regency/ Municipality</i>	Luas Panen (ha) <i>Harvested Area (ha)</i>		Produktivitas (ku/ha) <i>Yield (qu/ha)</i>		Produksi (ton) <i>Production (ton)</i>	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021
Kulon Progo	15.881,03	16.368,12	52,38	57,35	83.186,90	93.868,77
Bantul	21.654,66	24.920,78	56,60	59,04	122.555,99	147.125,71
Gunung Kidul	49.157,13	42.226,29	41,89	46,84	205.905,69	197.796,62
Sleman	23.842,32	24.940,04	46,84	50,60	111.678,95	126.203,02
Yogyakarta	12,98	7,08	52,71	53,69	68,42	38,01
D.I.Yogyakarta	110.548,12	108.462,31	47,35	52,09	523.395,95	565.032,13

Sumber: Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Angka 2022

C. Situasi Perekonomian D.I. Yogyakarta

C.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto adalah total nilai pasar semua barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu wilayah regional atau provinsi dalam kurun waktu satu tahun tertentu. PDRB dapat dibedakan menjadi dua yaitu PDRB atas dasar harga konstan dan PDRB atas dasar harga berlaku. Dalam penelitian ini yang digunakan adalah PDRB atas dasar harga konstan. PDRB atas dasar harga konstan adalah total nilai barang dan jasa yang diproduksi dan dihitung berdasarkan tahun dasar.

Secara umum pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai peningkatan dari suatu perekonomian dalam memproduksi barang-barang dan jasa-jasa. Dengan perkataan lain arah dari pertumbuhan ekonomi lebih kepada perubahan yang bersifat kuantitatif (*quantitative change*) dan biasanya dihitung dengan menggunakan data Produk Domestik Bruto (PDB) atau pendapatan atau nilai akhir pasar (*total market value*) dari barang akhir dan jasa (*final goods and service*) yang dihasilkan dari suatu perekonomian selama kurun waktu tertentu dan biasanya satu tahun. Untuk Menghitung pertumbuhan ekonomi secara nominal dapat digunakan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto). PDRB digunakan untuk berbagai tujuan tetapi yang terpenting adalah untuk mengukur kinerja perekonomian secara keseluruhan. Jumlah ini akan sama dengan jumlah 2 nilai nominal dari konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah untuk barang dan jasa, serta ekspor netto.

Berdasarkan Tabel 2.28. Lapangan Usaha yang memiliki nilai terbesar adalah sektor Informasi dan Komunikasi, kemudian diikuti sektor Industri pengolahan dan konstruksi. Sedangkan sektor yang memiliki nilai terendah

adalah sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, diikuti sektor Pengadaan Listrik dan Gas, dan Pertambangan dan Penggalian. Pada tahun 2020 nilai PDRB dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami penurunan, hal ini diakibatkan karena dampak Pandemi Covid 19 yang melanda banyak Negara. Sedangkan pada tahun 2021 nilai PDRB kembali mengalami peningkatan atau uptrend yang semula 101,679,600.20 menjadi 107,308,560.00 pada tahun 2022.

Tabel 3. PDRB ADHK 2010 (Juta Rupiah)

LAPANGAN USAHA	Harga Konstan 2010						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	7,667,60 1.70	7,779,80 1.30	7,930,31 4.50	8,101,23 3.30	8,183,68 9.40	8,526,74 0.30	8,584,39 0.00
B. Pertambang an dan Penggalian	471,323. 20	473,298. 70	489,349. 20	541,183. 60	557,653. 50	508,376. 00	492,580. 00
C. Industri Pengolahan	10,693,0 35.70	11,234,4 72.60	11,878,9 62.40	12,486,8 55.40	13,201,7 37.10	12,623,6 14.40	12,670,3 60.00
D. Pengadaan Listrik dan Gas	127,701. 30	145,910. 10	151,680. 90	156,706. 50	165,217. 40	162,929. 80	166,850. 00
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	85,260.2 0	87,268.2 0	90,288.8 0	94,923.3 0	103,372. 60	103,901. 00	110,990. 00
F. Konstruksi	7,826,70 0.70	8,250,60 8.30	8,828,64 8.00	9,984,76 0.00	11,420,6 40.10	9,634,83 6.10	10,679,2 70.00
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,944,90 2.70	7,366,32 4.70	7,787,54 1.30	8,219,28 9.30	8,643,43 7.90	8,253,02 5.20	8,379,07 0.00
H. Transportasi dan Pergudangan	4,541,30 9.50	4,750,17 2.80	4,976,40 5.70	5,304,84 3.60	5,493,40 2.20	4,383,20 7.20	4,467,91 0.00

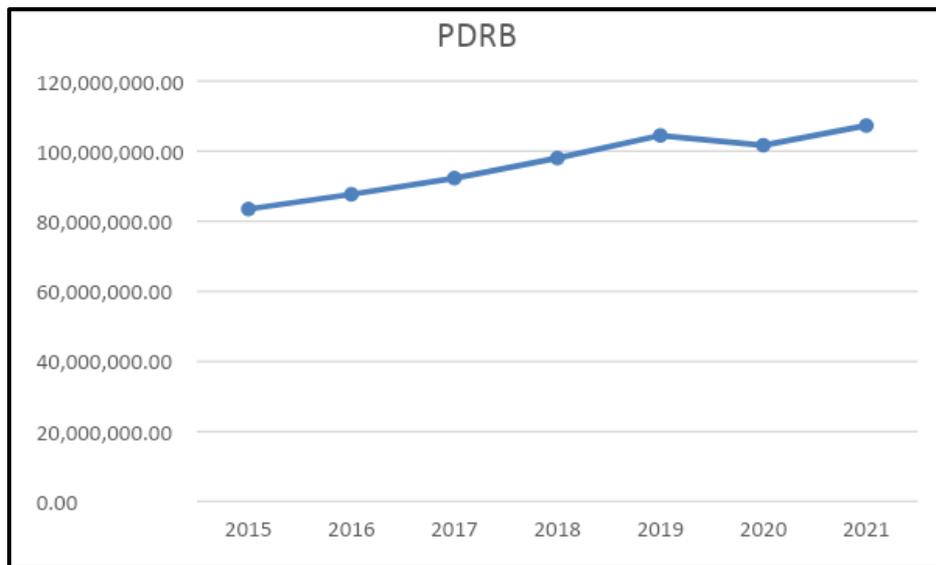
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,842,14 3.30	8,274,50 1.40	8,788,71 1.30	9,383,60 3.30	10,217,6 76.90	8,489,70 5.70	9,130,59 0.00
J. Informasi dan Komunikasi	8,891,14 4.90	9,630,63 9.10	10,222,3 83.30	10,884,5 32.60	11,694,9 91.80	13,998,3 35.90	16,329,8 00.00
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	3,060,73 2.90	3,213,47 8.10	3,303,79 7.60	3,506,58 7.60	3,805,38 6.00	3,763,89 6.10	3,818,58 0.00
L. Real Estat	6,082,48 8.70	6,394,24 8.80	6,708,23 9.40	7,079,83 9.30	7,499,62 7.40	7,594,52 9.50	7,637,70 0.00
M. Jasa Perusahaan	991,563. 80	1,026,16 3.50	1,086,91 1.80	1,146,81 1.60	1,224,23 5.00	1,041,99 3.50	1,126,30 0.00
N. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6,304,91 0.70	6,656,18 2.70	6,956,54 1.30	7,239,15 1.90	7,477,92 1.50	7,311,59 0.00	7,282,36 0.00
O. Jasa Pendidikan	7,444,27 6.50	7,672,85 0.00	8,096,34 5.90	8,583,07 3.60	9,146,78 3.80	9,555,49 5.50	10,033,0 90.00
P. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,210,40 5.60	2,310,35 6.40	2,445,24 0.60	2,593,23 3.40	2,764,57 1.40	3,294,79 9.10	3,442,20 0.00
Q. Jasa Lainnya	2,288,95 0.10	2,419,53 3.00	2,558,88 1.60	2,717,38 6.10	2,887,19 9.80	2,432,62 4.90	2,956,49 0.00
R. Produk Domestik Regional Bruto	83,474,4 51.50	87,685,8 09.70	92,300,2 43.60	98,024,0 14.40	104,487, 543.80	101,679, 600.20	107,308, 560.00

Sumber : BPS DI Yogyakarta (diolah)

C.2. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah suatu keadaan adanya peningkatan pendapatan yang terjadi karena peningkatan produksi pada barang dan jasa. Adanya peningkatan pendapatan ini tidak berkaitan dengan adanya peningkatan jumlah penduduk, dan bisa dinilai dari peningkatan output, teknologi yang semakin berkembang, dan inovasi pada bidang sosial.

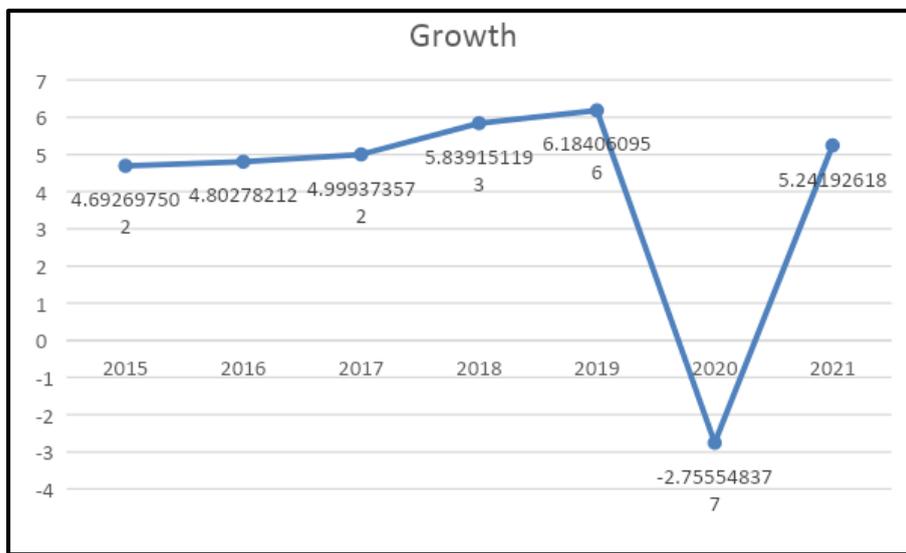
Pertumbuhan ekonomi juga memiliki arti suatu proses perubahan ekonomi yang terjadi pada perekonomian negara dalam kurun waktu tertentu menuju keadaan ekonomi yang lebih baik. Umumnya, pertumbuhan ekonomi ini identik dengan kenaikan kapasitas produksi yang direalisasikan dengan adanya kenaikan pendapatan nasional.



Gambar 1. PDRB Tahun 2015-2021

Sumber: BPS DI Yogyakarta (diolah)

Dari Gambar 1. dapat dilihat terjadi trend meningkat pada tahun 2015 hingga 2019, dan pada tahun 2020 perekonomian mengalami kontraksi akibat *pandemic 19* yang melanda, namun pada tahun 2021 PDRB mulai kembali menunjukkan kenaikan.



Gambar 2. Pertumbuhan PDRB Tahun 2015-2021

Sumber: BPS DI Yogyakarta (diolah)

Dari Gambar 2. dapat dilihat terjadi tren pertumbuhan ekonomi meningkat pada tahun 2015 hingga 2019, dan pada tahun 2020 perekonomian mengalami pertumbuhan negatif akibat *pandemic* 19 yang melanda, namun pada tahun 2021 pertumbuhan ekonomi menunjukkan adanya peningkatan kembali setelah adanya pandemi covid-19.

C.3. Struktur Perekonomian D.I. Yogyakarta

Teori perubahan struktur ekonomi menitikberatkan pada mekanisme transformasi ekonomi yang dialami oleh negara maupun pada daerah sedang berkembang yang semula bersifat subsisten dan menitik beratkan pada sektor pertanian menuju ke struktur ekonomi yang modern didominasi oleh sektor industri dan jasa (Todaro, 1999).

Menurut Kuznet dalam Jhingan (1992: 420), perubahan struktur ekonomi atau disebut juga transformasi struktural sebagai suatu rangkaian perubahan yang saling berkaitan satu sama lainnya dalam komposisi dari permintaan agregat, perdagangan luar negeri (ekspor dan impor), penawaran agregat (produksi dan penggunaan faktor-faktor produksi, seperti penggunaan tenaga kerja dan modal) yang disebabkan dengan adanya proses pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Perekonomian pada suatu daerah dalam jangka panjang akan mengalami perubahan struktur perekonomian yang semula mengandalkan sektor pertanian akan menuju sektor industri atau jasa. Pada sisi tenaga kerja akan menyebabkan terjadinya perpindahan penggunaan tenaga kerja dari sektor pertanian desa menuju ke sektor industri kota, sehingga kontribusi pertanian menurun.

Analisis teori pola pembangunan (*Pattern of Development*) menjelaskan perubahan struktur dalam proses perubahan ekonomi dari negara berkembang yang mengalami transformasi dari pertanian tradisional beralih ke sektor

industri sebagai mesin utama pertumbuhan ekonomi. Peningkatan peran sektor industri dalam perekonomian sejalan dengan peningkatan pendapatan perkapita yang berhubungan sangat erat dengan akumulasi capital dan peningkatan sumber daya manusia. a) Dilihat dari permintaan Domestik Apabila dilihat dari permintaan domestik akan terjadi penurunan permintaan terhadap konsumsi bahan makanan karena dikompensasikan oleh peningkatan permintaan pada barang non kebutuhan pangan, peningkatan investasi, dan peningkatan anggaran belanja pemerintah yang mengalami peningkatan dalam GNP yang ada. Di sektor perdagangan internasional terjadi juga perubahan yaitu peningkatan nilai ekspor dan impor. Sepanjang perubahan struktural ini berlangsung terjadi peningkatan pangsa ekspor komoditas hasil produksi sektor industri dan penurunan pangsa sektor yang sama pada sisi impor. b) Dilihat dari Tenaga Kerja Apabila dilihat dari sisi tenaga kerja ini akan terjadi proses perpindahan dari sektor pertanian menuju sektor industri, meski pergeseran ini masih tertinggal (*lag*) dibandingkan proses perubahan struktural itu sendiri. Dengan lag ini maka sektor pertanian akan berperan penting dalam peningkatan penyediaan tenaga kerja, baik dari awal maupun akhir dari proses transformasi perubahan struktural tersebut (Kuncoro, 2003: 65-69).

Tabel 4. Struktur Perekonomian DIY Tahun 2015 sd 2021 (Juta Rupiah)

Sektor	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Primer	8,138,92 4.90	8,253,10 0.00	8,419,66 3.70	8,642,41 6.90	8,741,34 2.90	9,035,11 6.30	9,076,97 0,00
Sekunder	18,732,6 97.90	19,718,2 59.20	20,949,5 80.10	22,723,2 45.20	24,890,9 67.20	22,525,2 81.30	23,627,4 70,00
Tersier	56,602,8 28.70	59,714,4 50.50	62,930,9 99.80	66,658,3 52.30	70,855,2 33.70	70,119,2 02.60	74,604,0 90,00
PDRB	83,474,4 51.50	87,685,8 09.70	92,300,2 43.60	98,024,0 14.40	104,487, 543.80	101,679, 600.20	107,308, 560,00

Sumber: BPS DI Yogyakarta, 2022

D. Kondisi Daya Dukung Daya Tampung di D.I. Yogyakarta

Perhitungan daya dukung lingkungan di DIY menggunakan data-data fisik seperti kemiringan lereng, penggunaan lahan, topografi, jenis tanah, kondisi geologi dan ketersediaan air. Fungsi dari perhitungan ini adalah untuk melihat perbandingan daya dukung lahan dan kemampuan lahan tinggi untuk mendukung pembangunan dan kepadatan penduduk dalam satu hamparan wilayah.

Percepatan penambahan jumlah penduduk selalu diimbangi dengan percepatan pembangunan, dan percepatan pembangunan berbanding lurus dengan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Dengan demikian maka pembangunan yang tidak mempertimbangkan kelestarian fungsi lingkungan tentu akan mempengaruhi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup (D3TLH). Lingkungan hidup adalah modal pembangunan, modal pembangunan itu harus dikaitkan dengan daya dukung dan daya tampung agar kualitas dan kuantitas Sumber Daya Alamnya tetap terjaga dengan baik. Tren seperti ini sulit karena yang banyak terjadi daerah-daerah dengan gampang membuka lahan pertanian untuk pembangunan aktifitas perdagangan dan jasa tanpa mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, seperti inilah yang menyebabkan sebagian keadaan Sumber daya Alam kita saat ini dalam kondisi rusak (potensinya menurun).

Hubungan dalam kajian valuasi jasa lingkungan adalah untuk melihat secara keseluruhan potensi lahan di DIY terhadap pertumbuhan sektor strategis yakni pertanian, pariwisata, industri, transportasi dan energi, lingkungan hidup. Berikut hasil analisis daya dukung daya tampung lingkungan hidup di DIY :

Tabel 5. Daya Dukung Lahan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun
2025-2041

No	Kemampuan Lahan Kabupaten	Luas (Ha)	Jumlah Penduduk 2025	Jumlah Penduduk 2030	Jumlah Penduduk 2035	Jumlah Penduduk 2040	KHL	DL (Ha) 2025	Status 2025	DL (Ha) 2030	Status 2030	DL (Ha) 2035	Status 2035	DL (Ha) 2041	Status 2040
1	Kulon Progo	57.872	441.192	445.068	449.961	454.907	0,0047	2.07	Nilai DL <	2.092	Nilai DL <	2.11	Nilai DL <	2.138	Nilai DL <
	Tinggi						0,0047		Luas		Luas		Luas		Luas
	Sedang	29.985					0,0047		Kemampuan		Kemampuan		Kemampuan		Kemampuan
	Rendah	2.872					0,0047		Lahan		Lahan		Lahan		Lahan
									(Surplus)		(Surplus)		(Surplus)		(Surplus)
2	Bantul	51.136	985.796	985.816	985.842	985.867	0,0047	4.63	Nilai DL <	4.633	Nilai DL <	4.63	Nilai DL <	4.633	Nilai DL <
	Tinggi						0,0047		Luas		Luas		Luas		Luas
	Sedang	4.749					0,0047		Kemampuan		Kemampuan		Kemampuan		Kemampuan
	Rendah	6.897					0,0047		Lahan		Lahan		Lahan		Lahan
									(Surplus)		(Surplus)		(Surplus)		(Surplus)
3	Gunung Kidul	147.628	751.461	754.918	759.262	763.631	0,0047	3.53	Nilai DL <	3.548	Nilai DL <	3.56	Nilai DL <	3.589	Nilai DL <
	Tinggi						0,0047		Kemampuan		Kemampuan		Kemampuan		Kemampuan
	Sedang	53.413					0,0047		Lahan		Lahan		Lahan		Lahan
	Rendah	0					0,0047		(Surplus)		(Surplus)		(Surplus)		(Surplus)

4	Sleman	57.434	1.138.236	1.148.280	1.160.960	1.173.780	0,0047	5.350	Nilai DL <	5.397	Nilai DL <	5.457	Nilai DL <	5.517	Nilai DL <
	Tinggi						0,0047		Luas		Luas		Luas		Luas
	Sedang	1.210					0,0047		Kemampuan		Kemampuan		Kemampuan		Kemampuan
	Rendah	39.126					0,0047		Lahan		Lahan		Lahan		Lahan
									(Surplus)		(Surplus)		(Surplus)		(Surplus)
5	Kota	3.280	396.310	415.477	440.745	467.550	0,0047	1.863	Nilai DL >	1.953	Nilai DL >	2.072	Nilai DL >	2.197	Nilai DL >
	Yogyakarta								Luas		Luas		Luas		Luas
	Tinggi						0,0047		Kemampuan		Kemampuan		Kemampuan		Kemampuan
	Sedang	0,00					0,0047		Lahan		Lahan		Lahan		Lahan
	Rendah	3.274,77					0,0047		(Defisit)		(Defisit)		(Defisit)		(Defisit)

Sumber: Laporan akhir valuasi jasa lingkungan, 2021

D.1. Daya Dukung Lahan Bangunan

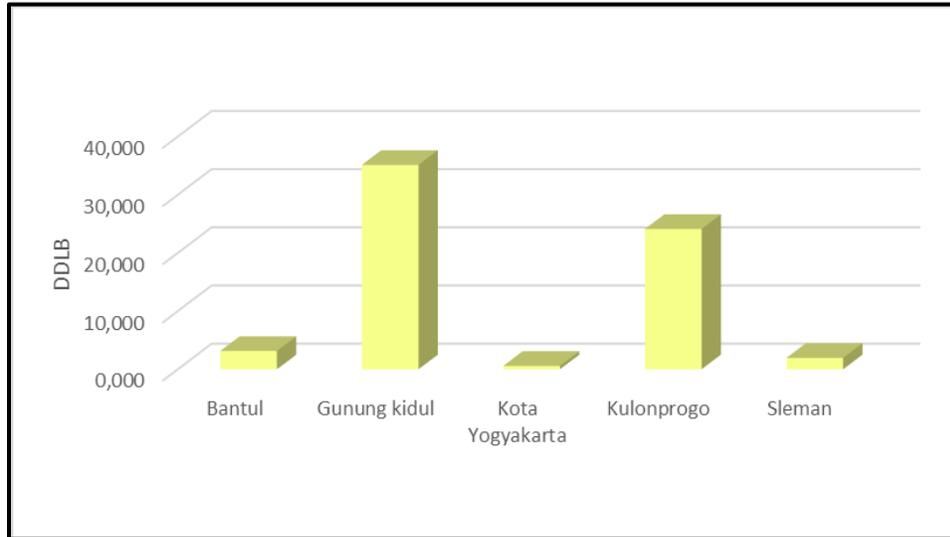
Pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat menyebabkan kebutuhan lahan untuk permukiman semakin meningkat. Oleh karena itu, evaluasi terhadap daya dukung wilayah untuk penggunaan lahan bangunan perlu dilakukan. Perhitungan DDLB di kabupaten kota di Daerah Istimewa Yogyakarta dilakukan dengan menghitung luas wilayah dan luas lahan bangunan pada wilayah tersebut) laporan akhir valuasi jasa lingkungan, 2021)

- Luas wilayah DIY (LW) = 317.350,92 ha
- Luas lahan bangunan (LB) = 33.705,65 ha
- Luas lahan untuk infrastruktur (LTp) = (20% x LB) + luas bandara
= (20% x 33.705,65) + 3,18
= 6.741,13

Sehingga daya dukung wilayah tersebut adalah:

$$\begin{aligned} \text{DDLB} &= \frac{a.Lw}{LTb} \\ &= \frac{70\% \times 317.350,92}{6.741,13} \\ &= 5,49 \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan tersebut, daya dukung lahan bangunan di Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar 21,58 yaitu DDLB > 3. Daya dukung lahan bangunan masuk dalam kategori **aman/baik**, hal ini dikarenakan luas lahan terbangun sebesar 6,74% dari luas wilayah keseluruhan Daerah Istimewa Yogyakarta. Nilai DDLB menunjukkan bahwa pembangunan lahan terbangun di Daerah Istimewa Yogyakarta masih dimungkinkan untuk pembangunan. Adapun DDLB menurut Daerah Istimewa Yogyakarta dapat dilihat pada grafik berikut.



Gambar 3. Grafik Daya Dukung Lahan Kabupaten Kota di DIY Tahun 2020

D.2. Daya Dukung Lahan Pertanian (DDL_P)

D.2.1. Ketersediaan Lahan Pangan

Data yang diperlukan dalam perhitungan ketersediaan lahan yaitu produksi actual tiap jenis komoditi (P_i) dan harga beras di tingkat produsen (H_b), harga satuan tiap komoditi ditingkat produsen (H_i), dan produktivitas beras di Daerah Istimewa Yogyakarta. Perhitungan total nilai produksi tiap komoditas di Daerah Istimewa Yogyakarta menggunakan data sekunder dari Dinas Pertanian Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019, yang juga menjadi dasar perhitungan ketersediaan lahan di Daerah Istimewa Yogyakarta hingga beberapa tahun kedepan. Nilai produksi tiap komoditas di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 6. Nilai Produksi Tiap Komoditas di DIY Tahun 2020

No	Komoditi	Harga satuan	DIY	
		(Hi) (Rp./kg)	Pi (kg)	Pi x Hi
PADI DAN PALAWIJA				
1.	Padi	9000	533.650.820	4.802.857.380.000
2.	Jagung	4000	54.473.070	217.892.280.000
SAYUR-SAYURAN				
1.	Bawang Daun	3.000	141.200	423.600.000
2.	Bawang merah	25.000	143.700	3.592.500.000
3.	Bayam	13.800	1.503.700	20.751.060.000
4.	Buncis	30.680	676.700	20.761.156.000
5.	Cabai Besar	55.000	44.543.600	2.449.898.000.000
6.	Cabai Rawit	30.000	15.052.300	451.569.000.000
7.	Jamur	12.000	23.755.000	285.060.000.000
8.	Kacang Merah	25.000	45.300	1.132.500.000
9.	Kangkung	22.500	3.779.300	85.034.250.000
10.	Kacang Panjang	15.000	3.962.500	59.437.500.000
11.	Kembang Kol	8.000	260.500	2.084.000.000
12.	Ketimun	5.000	1.393.300	6.966.500.000
13.	Labu siam	56.666	148.300	8.403.567.800
BUAH-BUAHAN				
1.	Melon	30.000	22.230.400	666.912.000.000
2.	Petai	85.000	3.337.100	283.653.500.000
3.	Semangka	56.666	7.089.800	401.750.606.800
4.	Strawberry	40.000	200	8.000.000
5.	Terung	10.000	3.052.700	30.527.000.000
PERKEBUNAN				
1.	Kelapa	2.300	46.496.860	106.942.778.000
2.	Karet	18.000	7.170	129.060.000
3.	Kopi	180.000	533.680	96.062.400.000
4.	Kakao	30.000	1.962.050	58.861.500.000
5.	Tebu	92	9.697.800	892.197.600
6.	The	2.400	242.190	581.256.000

7.	Tembakau	60.000	1.001.130	60.067.800.000
Total nilai produksi		829.104	779.180.370	10.122.251.392.200

Sumber : Laporan akhir valuasi jasa lingkungan, 2021

D.2.2. Kebutuhan Lahan Pangan

Kebutuhan lahan dihitung berdasarkan kebutuhan hidup layak per penduduk. Untuk memenuhi kebutuhan hidup penduduk yang layak dapat diasumsikan setara dengan 1 ton beras/kapita/tahun. Analisis kebutuhan lahan pertanian di DIY pada Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 7. Kebutuhan Lahan Pertanian di DIY Tahun Awal dan Proyeksi

Komponen	Simbol	Satuan	Tahun eksisiting		Tahun proyeksi				
			2019	2020	2021	2026	2031	2036	2041
DIY									
Jumlah penduduk	N	Penduduk	3.842.932	3.668.719	3.689.899	3.803.845	3.934.570	4.053.236	4.176.860
Produktivitas Beras	Ptvb	kg/Ha	4.766,9	4.766,9	4.766,9	4.766,9	4.766,9	4.766,9	4.766,9
Luas lahan untuk hidup layak per penduduk	KHL	Ha	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21
Kebutuhan lahan	DL = N x KHL	Ha	806.164,16	769.618,04	774.061,18	797.964,64	825.387,86	850.281,50	876.215,06

Sumber : Laporan akhir valuasi jasa lingkungan, 2021

Tabel 7. menunjukkan pada tahun 2021 dengan jumlah penduduk 3.689.899 jiwa maka dibutuhkan lahan pertanian sebesar 774.061 hektar. Jumlah penduduk di DIY sangat berperan penting dalam tingkat konsumsi pangan sehingga ketersediaan lahan dan kebutuhan lahan untuk pangan cenderung mengalami defisit.

D.2.3. Status Daya Dukung Lahan Pertanian

Status daya dukung lahan pertanian di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah sebagai berikut:

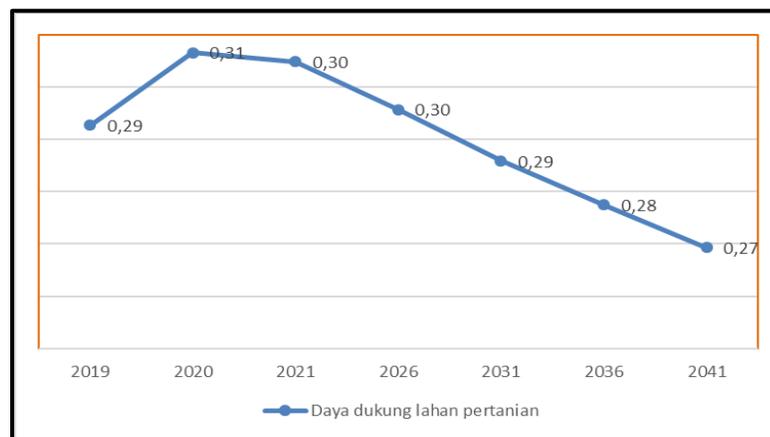
Tabel 8. Daya Dukung Lahan di Daerah Istimewa Yogyakarta

Komponen	Simbol		Satuan	Tahun eksisiting			Tahun proyeksi			
				2019	2020	2021	2026	2031	2036	2041
DIY										
Ketersediaan	SL	Ha	235.936,64	235.936,64	235.936,64	235.936,64	235.936,64	235.936,64	235.936,64	
Komponen	Simbol	Satuan	Tahun eksisiting			Tahun proyeksi				
			2019	2020	2021	2026	2031	2036	2041	
DIY										
Lahan										
Kebutuhan lahan	DL	Ha	806.164,16	769.618,04	774.061,18	797.964,64	825.387,86	850.281,50	876.215,06	
Status Daya Dukung Lahan	Surplus, jika SL > DL		DL > SL	DL > SL	DL > SL	DL > SL	DL > SL	DL > SL	DL > SL	
	Defisit, jika DL > SL		Defisit	Defisit	Defisit	Defisit	Defisit	Defisit	Defisit	
Daya			0,29	0,31	0,30	0,30	0,29	0,28	0,27	

dukung lahan pertanian	DDLp = SL/DL	Terlampa ui / buruk						
------------------------	--------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Sumber : Laporan akhir valuasi jasa lingkungan, 2021

Nilai daya dukung lahan pertanian di wilayah DIY pada tahun 2021 adalah 0,30, tahun 2031 0,29 dan tahun 2041 menjadi 0,27. Dari tahun ke tahun daya dukung lahan pertanian di DIY mengalami penurunan cukup besar sementara kebutuhan lahan semakin tinggi.



Gambar 4. Daya Dukung Lahan Pertanian

Hasil analisis daya dukung lahan pertanian menunjukkan bahwa daya dukung lahan pertanian dalam kondisi terlampaui atau dalam kondisi buruk di seluruh wilayah DIY. Kondisi tersebut akan terjadi pada Tahun 2021 dan diperkirakan akan terus terjadi hingga tahun 2041 jika tidak ada upaya untuk meningkatkan ketersediaan kebutuhan lahan pertanian. Hasil analisis juga menunjukkan terus terjadinya penurunan nilai DDLP dari tahun ke tahun.

D.3. Daya Dukung Air Berdasarkan Air Limpasan (DDA)

D.3.1. Ketersediaan Air

Ketersediaan air limpasan dengan menghitung C (koefisien limpasan), dari setiap penggunaan lahan, Koefisien limpasan setiap penggunaan lahan

di Daerah Istimewa Yogyakarta dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 9. Koefisien Limpasan Setiap Penggunaan Lahan di Daerah Istimewa Yogyakarta

Penggunaan Lahan	Koefisien limpasan penggunaan lahan i	Bantul		Gunung Kidul		Kota Yogyakarta		Kulon Progo		Sleman		DIY	
		Ci	Ai(Ha)	Ci x Ai	Ai(Ha)	Ci x Ai	Ai(Ha)	Ci x Ai	Ai(Ha)	Ci x Ai	Ai(Ha)	Ci x Ai	Ai(Ha)
Bandara	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,28	65,57	109,28	65,57
Hutan Sekunder	0,03	164,80	4,94	0,00	0,00	0,00	0,00	2506,13	75,18	657,57	19,73	3328,50	99,86
Kebun Campuran	0,30	18817,16	5645,15	32028,02	9608,41	0,00	0,00	14527,75	4358,32	9086,63	2725,99	74459,55	22337,87
Permukiman	0,70	9452,99	6617,09	2451,22	1715,85	3267,34	2287,14	1399,90	979,93	17134,21	11993,94	33705,65	23593,96
Sawah	0,30	16647,37	4994,21	2001,25	600,37	12,33	3,70	11150,59	3345,18	25635,53	7690,66	55447,07	16634,12
Semak/Belukar	0,35	627,61	219,66	9775,35	3421,37	0,00	0,00	32,74	11,46	1264,42	442,55	11700,12	4095,04
Tanah Terbuka	0,35	276,56	96,80	0,00	0,00	0,00	0,00	8,49	2,97	1138,69	398,54	1423,74	498,31
Tegalan/Ladang	0,30	4605,66	1381,70	101329,12	30398,74	0,00	0,00	27418,65	8225,60	2316,36	694,91	135669,80	40700,94
Tubuh Air	0,05	544,07	27,20	42,97	2,15	0,00	0,00	827,95	41,40	91,25	4,56	1506,24	75,31
Total		51.136,22	18.986,75	147.627,93	45.746,89	3.279,67	2.290,84	57.872,20	17.040,04	57.433,94	24.036,45	317.349,95	108.100,98

Sumber : Laporan akhir valuasi jasa lingkungan, 2021

D.3.2. Kebutuhan Air

Jumlah penduduk di DIY pada Tahun 2021 sebanyak 3.668.719 jiwa, yang berarti bahwa DIY termasuk kategori kota dengan standar kebutuhan air sebesar 90- 100 liter/kapita/hari atau 32,85 m³/kapita/tahun. Sehingga kebutuhan air domestik di DIY adalah yaitu sebagai berikut.

Tabel 10. Tabel Kebutuhan Air DIY Tahun 2021

Wilayah	Kebutuhan air (m ³ /tahun)		
	Domestik	Non Domestik	Total
Bantul	32.400.991	951.661.791	984.062.783
Gunung Kidul	24.751.231	2.741.912.735	2.766.663.966
Kota Yogyakarta	12.375.350	71.147.406	83.522.757
Kulon Progo	14.502.192	1.535.836.296	1.550.338.488
Sleman	37.183.424	1.589.846.719	1.627.030.143
DIY	121.213.189	6.890.404.948	7.011.618.137

Sumber : Laporan akhir valuasi jasa lingkungan, 2021

D.3.3. Status Daya Dukung Air

Penentuan daya dukung sumber daya air dengan perhitungan menggunakan Formula 1 dihitung dari koefisien limpasan air. Faktor utama yang mempengaruhi besarnya air limpasan, yaitu faktor yang berkaitan dengan karakteristik hujan. Hasil analisis daya dukung sumber daya air menggunakan air limpasan di DIY Tahun 2020- 2041, sebagai berikut.

Tabel 11. Status Daya Dukung Air DIY Tahun 2020-2041

Komponen	Tahun eksisiting				Tahun proyeksi		
	2019	2020	2021	2026	2031	2036	2041
Ketersediaan Air	3.298.019.595,34	3.298.019.595,34	3.298.019.595,34	3.298.019.595,34	3.298.019.595,34	3.298.019.595,34	3.298.019.595,34
Kebutuhan Air	7.595.906.034,87	7.590.183.137,82	7.590.878.907,30	7.594.622.039,96	7.598.916.346,59	7.602.814.536,63	7.606.875.572,24
Daya Dukung Air	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43
Keterangan	Terlampau / Buruk						

Sumber : Laporan akhir valuasi jasa lingkungan, 2021

Secara keseluruhan, nilai daya dukung air di DIY Tahun 2020 berdasarkan perhitungan formula 1 (air limpasan) adalah 0,43 yang berarti daya dukung air di Provinsi DIY tahun 2020 sudah terlampaui atau dalam kondisi buruk. Daya Dukung Air di Provinsi DIY tahun 2041 sebesar 0,43 yang artinya tidak mengalami peningkatan dan kondisinya sama dengan daya dukung air Tahun 2020. Penurunan daya dukung air di Provinsi DIY akibat dari perkiraan peningkatan jumlah penduduk yang mempengaruhi peningkatkan kebutuhan air penduduk.

D.4. Daya Dukung Ekonomi (DDE)

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Provinsi DIY Tahun 2021, Nilai PDRB total di DIY pada tahun 2019 adalah Rp 1.045.028.900.000,-. Jumlah penduduk Provinsi DIY tahun 2019 adalah 3.842.932 jiwa, dan nilai konsumsi menggunakan perkembangan pengeluaran per jiwa adalah Rp 1.339.726,-/bulan atau Rp 16.076.712,-/tahun.

Data PDRB total, jumlah penduduk dan perkembangan pengeluaran pada Tahun 2019 tersebut menjadi dasar perhitungan daya dukung ekonomi hingga beberapa tahun kedepan. Perhitungan daya dukung ekonomi Provinsi DIY dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 12. Perhitungan Daya Dukung Ekonomi Provinsi DIY Tahun 2021-2041

Tahun	Jumlah	Daya Dukung Ekonomi	Keterangan
2019	3.842.932	0,02	Tidak Mendukung
2020	3.668.719	0,02	Tidak Mendukung
2021	3.689.899	0,02	Tidak Mendukung
2026	3.803.845	0,02	Tidak Mendukung
2031	3.934.570	0,02	Tidak Mendukung
2036	4.053.236	0,02	Tidak Mendukung
2041	4.176.860	0,02	Tidak Mendukung

Sumber : Kajian evaluasi jasa lingkungan, 2021

Tabel diatas menunjukkan bahwa daya dukung ekonomi di Provinsi DIY termasuk DDE < 1 sejak Tahun 2020 hingga 2041, yang berarti bahwa pada tahun tersebut diperkirakan kemampuan sumberdaya dan ekonomi wilayah di Provinsi DIY sudah tidak mampu mendukung kebutuhan dan konsumsi penduduk dalam batas minimal.

D.5. Daya Dukung Fungsi Lindung

Provinsi DIY dengan luas wilayah dari hasil pemetaan RTRW DIY Tahun 2019- 2046 adalah sebesar 317.350 hektar. Perhitungan luas guna lahan fungsi lindung dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 13. Daya Dukung Fungsi Lindung Provinsi DIY Tahun 2021

Komponen	Simbol	Satuan	Nilai
Luas Wilayah	LW	Ha	317.350
Luas Guna Lahan	LGL	Ha	104.274
Daya Dukung Fungsi Lindung	$DDFL=LGL/LW$		0,33

Sumber : Kajian evaluasi jasa lingkungan, 2021

Hasil perhitungan dan analisis daya dukung fungsi lindung di Provinsi DIY Tahun 2020 memperlihatkan nilai 0,33. Nilai ini sudah mendekati angka nol, sehingga kondisi fungsi lindung DIY termasuk dalam kategori fungsi lindung rendah. Daya dukung fungsi lindung yang rendah mengindikasikan bahwa wilayah DIY saat ini kurang berfungsi lindung. Ini artinya kondisi wilayah DIY sudah tidak bisa mendukung kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan buatan. Daya dukung fungsi lindung menurut kabupaten juga menandakan bahwa fungsi lindung tergolong rendah dengan hasil nilai DDFL 0,29 – 0,33. Adapun kondisi daya dukung fungsi lindung menurut kabupaten di Provinsi DIY tahun 2021, yaitu sebagai berikut.

Berdasarkan hasil analisis dari berbagai kajian sebelumnya maka diperoleh beberapa potensi dan permasalahan yang berkaitan dengan ekonomi hijau. Potensi-potensi tersebut adalah:

1. Kualitas pembangunan manusia di DIY termasuk sangat baik jika dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain di Indonesia.
2. Perguruan tinggi yang ada di DIY sangat aktif dalam melakukan penelitian dan pengembangan teknologi ramah lingkungan.

3. Potensi tenaga surya di DIY (dalam bentuk PV rooftop) cukup besar sehingga bisa menjadi sumber energi yang bisa digunakan untuk membangkitkan listrik.
4. Pelaku ekonomi kreatif di DIY sangat aktif melakukan inovasi produk dan jasa yang pada akhirnya bisa meningkatkan pendapatan mereka.
5. Karakteristik masyarakat DIY yang sopan, ramah dan suka gotong royong menjadi modal sosial yang penting dalam pembangunan ekonomi DIY.
6. Pemerintah Provinsi DIY menyadari pentingnya penerapan konsep ekonomi hijau.
7. Penerapan kebijakan ekonomi hijau di DIY mendapatkan dukungan dari Pemerintah Pusat (Kementerian PPN/Bappenas) melalui agenda penerapan kebijakan pembangunan rendah karbon mulai tahun 2020.
8. Lembaga-lembaga donor internasional, seperti UNEP, WWF dan GIZ, sangat aktif mendukung pembiayaan program-program yang ditujukan untuk melaksanakan konsep ekonomi hijau di negara-negara sedang berkembang seperti Indonesia. Negara-negara tetangga cukup sukses dalam menerapkan konsep green economy, seperti Malaysia (*green supply chain*) dan Singapura (*sustainable transport*).

Sementara itu, permasalahan-permasalahan yang masih menghambat pelaksanaan kebijakan ekonomi hijau adalah:

1. Laju pertumbuhan penduduk DIY yang cukup tinggi memberikan tekanan untuk melakukan alih fungsi lahan dari lahan pertanian menjadi bangunan (baik untuk perumahan, perkantoran maupun usaha/bisnis) dan jalan.
2. Tiga sektor yang menyerap tenaga kerja paling banyak di DIY, yaitu Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, Industri Pengolahan, serta Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, kontribusinya selama 2010-2018 cenderung menurun.

3. Tingkat kesenjangan distribusi pendapatan yang tinggi menyulitkan Pemerintah Provinsi DIY untuk melaksanakan pembangunan ekonomi inklusif.
4. Tingkat kemacetan lalu lintas yang tinggi selain menyebabkan polusi udara juga mengurangi kenyamanan dalam bepergian sehingga berpotensi mengurangi daya tarik DIY.
5. Pembangunan hotel berbintang, mall dan apartemen di DIY terkadang tidak disertai dengan AMDAL yang baik dan benar sehingga akses air bersih masyarakat di sekitarnya menjadi berkurang.
6. Beberapa pasar tradisional di DIY kondisinya masih kumuh dan belum tertata dengan baik.
7. Sebagian bus dan angkutan umum yang beroperasi di DIY belum lolos uji emisi sehingga menghasilkan asap buangan yang hitam dan tebal.
8. Beberapa jenis UMKM di DIY, seperti UMKM makanan dan batik, belum membuang limbah dengan baik dan benar sehingga menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan.
9. Meningkatnya laju pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi menyebabkan volume sampah di DIY meningkat, sedangkan lahan yang tersedia untuk TPS dan TPA semakin terbatas.
10. Peraturan Menteri ESDM No. 50 Tahun 2017 menjadi disinsentif bagi pengembangan pembangkit listrik Energi Baru dan Terbarukan (EBT) di daerah-daerah yang surplus tenaga listrik, terutama di Pulau Jawa.
11. Proyek pembangunan pembangkit listrik 35.000 MW menjadi disinsentif bagi pengembangan pembangkit listrik EBT di daerah-daerah di Pulau Jawa karena porsi Jawa - Bali paling besar dibandingkan dengan pulau-pulau besar lainnya.

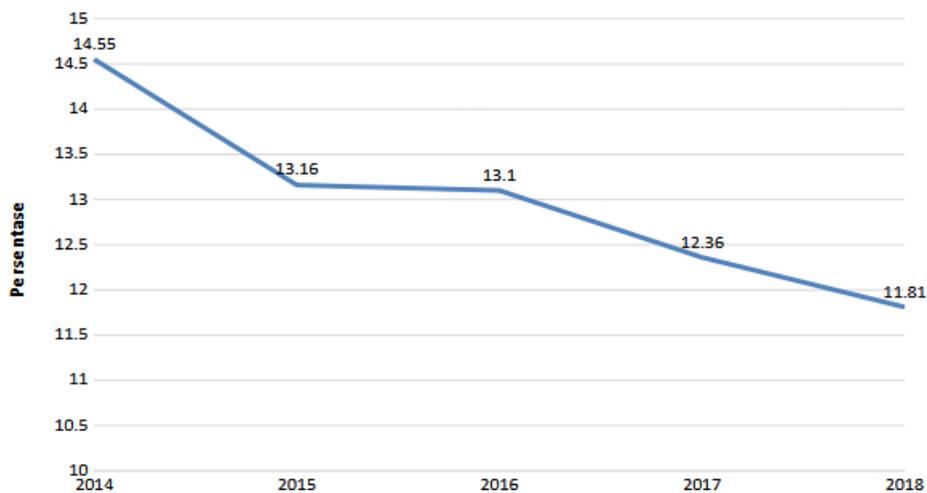
12. Daerah-daerah lain di Indonesia seperti Aceh dan Kalimantan Timur kurang begitu sukses dalam menerapkan kebijakan ekonomi hijau di bidang perkebunan kelapa sawit.

E. Analisis Isu Strategis

Isu-isu strategis mengacu pada Peraturan Daerah DIY No. 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022. Meskipun demikian, tidak semua isu strategis yang ada di dalam dokumen perencanaan tersebut akan dijelaskan, namun dipilih yang sesuai dengan konteks ekonomi hijau.

1. Tingginya Angka Kemiskinan

Sama halnya dengan daerah lain, masalah kemiskinan di DIY juga belum bisa sepenuhnya diatasi. Berdasarkan data BPS tahun 2019, angka kemiskinan di DIY merupakan yang tertinggi di Pulau Jawa. Angka kemiskinan DIY mencapai 11,81 persen pada bulan September 2018 atau sekitar 450 ribu jiwa. Meskipun secara nominal, jumlah tersebut adalah yang paling rendah, namun ketika dibandingkan dengan jumlah penduduk keseluruhan, persentasenya menjadi relatif tinggi.



Gambar 5. Persentase Penduduk Miskin D.I.Yogyakarta 2014-2018 (%)

Sumber: BPS (2019)

Persentase penduduk miskin DIY masih di bawah Jawa Tengah (11,19 persen) dan Jawa Timur (10,85 persen) serta masih lebih tinggi dari angka kemiskinan nasional yang sebesar 9,66 persen.

Gambar 5. menunjukkan bahwa persentase kemiskinan di DIY memiliki tren menurun dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2014 ke 2015, angka kemiskinan turun 1,2 poin lalu diikuti penurunan yang cenderung stagnan pada tahun 2015-2016. Pada tahun 2016-2018 penurunan kemiskinan cukup signifikan hingga menjadi 11,81 persen. Kabupaten Gunungkidul dan Kulonprogo adalah dua kabupaten dengan tingkat kemiskinan tertinggi di DIY. Pada tahun 2018, kedua kabupaten tersebut memiliki tingkat kemiskinan 18,3 persen dan 17,12 persen berturut-turut. Angka ini sudah menurun cukup signifikan dibandingkan dengan tahun 2011 yang mencapai 23 persen. Alasan mengapa tingkat kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Gunungkidul masih tinggi adalah karena kondisi alam yang tidak begitu mendukung dan kegiatan investasi yang masih relatif rendah daripada kabupaten/kota lainnya.

Tabel 14. Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di DIY 2011-2018

Kabupaten/Kota	Tahun							
	2011	2012	2013	2014	2015 (Maret)	2016 (Maret)	2017 (Maret)	2018 (Maret)
Kulonprogo	23,62	23,31	21,39	20,64	21,40	20,30	20,03	18,30
Bantul	17,20	16,97	16,48	15,89	16,33	14,55	14,07	13,43
Gunungkidul	23,03	22,72	21,70	20,83	21,73	19,34	18,65	17,12
Sleman	10,61	10,44	9,68	9,50	9,46	8,21	8,13	7,65
Yogyakarta	9,62	9,38	8,82	8,67	8,75	7,70	7,64	6,98

Sumber: BPS (2019)

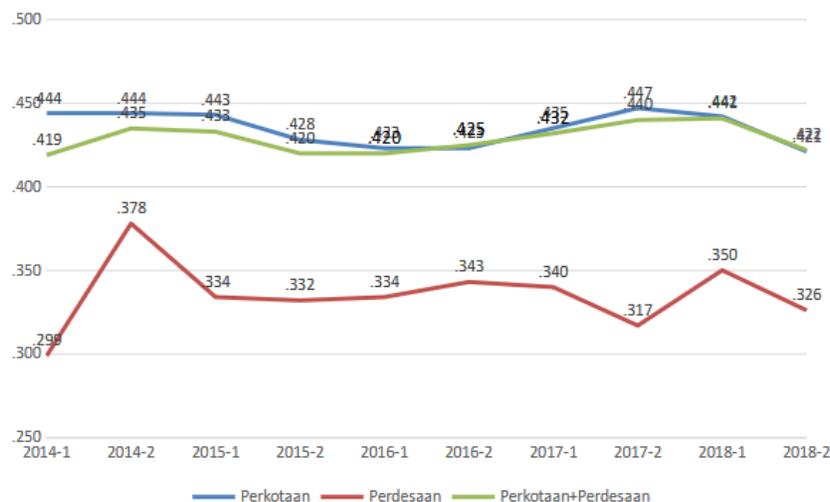
Meskipun Pemerintah DIY telah dan akan terus berupaya untuk mengentaskan kemiskinan, namun pada kenyataannya tidak semua penduduk miskin bisa dientaskan. Penduduk miskin yang berada di level

menengah masih bisa dilakukan pemberdayaan, seperti program program pelatihan dan pendampingan untuk meningkatkan keterampilan produktivitas dan jiwa kewirausahaan. Akan tetapi, bagi penduduk miskin yang berada di level paling bawah, tidak mudah untuk membuat mereka menjadi produktif. Menurut Bappeda DIY (2019), setidaknya ada 4,06 persen penduduk miskin DIY yang sulit dientaskan. Rinciannya adalah sebagai berikut:

1. Usia non-produktif sebanyak 2,96persen;
2. Usia produktif yang memiliki kecacatan sebanyak 0,82 persen; dan
3. Usia produktif yang menderita penyakit kronis sebanyak 0,28 persen

2. Tingginya Ketimpangan Pendapatan dan Ketimpangan Wilayah

Ketimpangan dari segi ekonomi dapat diukur menggunakan Rasio Gini. Jika Rasio Gini semakin mendekati satu, maka ketimpangan semakin tinggi. Sebaliknya, jika rasio ini semakin mendekati angka 0, maka pendapatan semakin merata. Rasio Gini DIY pada tahun 2018 sebesar 0,42. Sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 2.20, Rasio Gini DIY secara keseluruhan cukup stabil pada kisaran 0,42 dengan beberapa kali naik-turun ke level 0,44.



Sumber: BPS (2019)

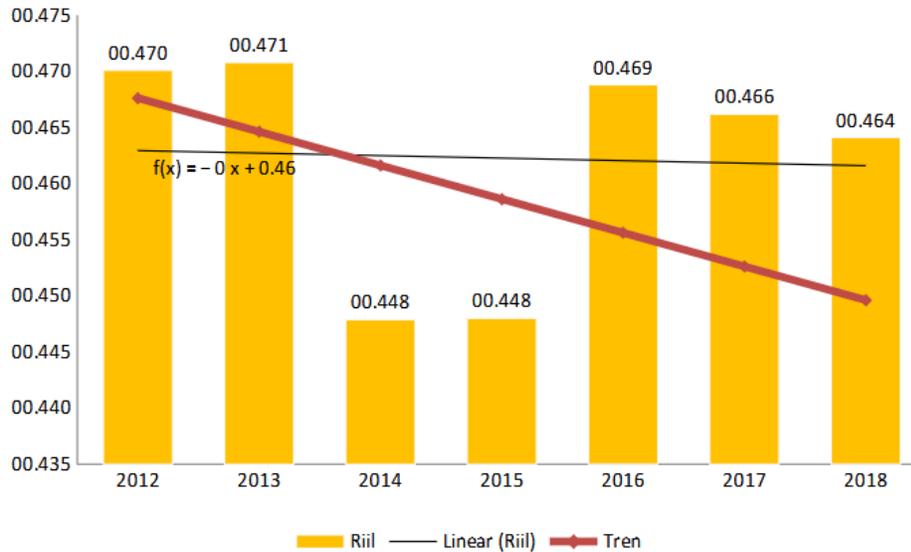
Gambar 6. Rasio Gini Perkotaan dan Perdesaan di DIY 2013-2018

Gambar 6 juga menunjukkan kondisi ketimpangan wilayah perkotaan dan perdesaan di DIY. Dapat dilihat bahwa secara umum kedua wilayah memiliki tren ketimpangan yang cukup stabil meskipun pada tingkatan yang berbeda. Daerah perkotaan memiliki Rasio Gini yang lebih tinggi daripada daerah perdesaan. Rasio Gini daerah perkotaan pada kurun waktu 5 tahun terakhir mencapai 0,42-0,44 sedangkan daerah perdesaan memiliki Rasio Gini yang berkisar pada 0,3 hingga 0,38.

Kesejahteraan penduduk di daerah perdesaan relatif sama karena sumber pendapatan yang juga cenderung homogen. Di sisi lain, disparitas kesejahteraan penduduk perkotaan cukup lebar karena kepemilikan sumber daya antar penduduk yang tingkatannya beragam. Jika dicermati lebih jauh, di samping desa-kota, ketimpangan juga terjadi antar kabupaten dan kota di DIY.

Ketimpangan wilayah dapat diukur dengan Indeks Williamson. Dalam kurun waktu 2012 - 2018, terjadi penurunan tren Indeks Williamson di DIY (Gambar 2.24). Akan tetapi, justru terjadi peningkatan Indeks Williamson pada tahun 2015–2016, yang berarti peningkatan disparitas antar kabupaten/kota di DIY. Nilai Indeks Williamson di DIY relatif tinggi dibandingkan nilai wajarnya, yaitu tidak lebih dari 0,35. Salah satu pemicunya adalah terpusatnya aktivitas perekonomian di daerah perkotaan terutama di Kota Yogyakarta dan daerah yang menjadi penyangga, yaitu Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul (poros Kartamantul). Pertumbuhan di daerah perkotaan cenderung pesat dengan ciri perdagangan, jasa, hotel, dan restoran yang terus berkembang untuk mendukung sektor pariwisata/pendidikan. Kota terus berkembang terus hingga wilayah sub urban (perbatasan desa-kota) yang terus menggerus lahan pertanian subur. Sebaliknya, situasi di perdesaan menunjukkan sektor pertanian semakin tertekan. Laju urbanisasi cenderung tinggi sehingga banyak sumberdaya potensial berpindah dari desa ke kota.

Situasi ini lah yang semakin memicu kesenjangan



Sumber:BPS(2019)

Gambar 7. Indeks Williamson DIY, 2012-2018

Secara umum, dapat dipahami dari deskripsi data sebelumnya bahwa daerah perkotaan lebih sejahtera daripada daerah pedesaan namun ketimpangannya tinggi. Dengan kata lain, pembangunan di daerah perkotaan masih belum sepenuhnya mengakomodasi peningkatan kesejahteraan penduduk miskin perkotaan. Di sisi lain, pembangunan pedesaan meskipun merata namun masih perlu ditingkatkan. Memperluas akses daerah pedesaan terhadap teknologi informasi yang dibarengi dengan penyiapan modal manusia menghadapi era Revolusi Industri 4.0 akan sangat bermanfaat untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

3. Pencemaran, Kerusakan Alam dan Resiko Bencana Alam

Data potensi Desa yang dirilis oleh BPS pada tahun 2018 menyebutkan bahwa pencemaran air merupakan jenis pencemaran yang paling banyak dialami oleh desa-desadi DIY. Dari 428 desa/kelurahan di DIY, 99 diantaranya

mengalami pencemaran air dan 75 lagi mengalami pencemaran udara. Sumber pencemaran didominasi oleh rumah tanggadan pabrik. Kondisi ini sesuai dengan keterangan dari kajian sebelumnya yang menyebutkan bahwa masih banyak usaha yang belum melaksanakan aspek yang menjadi kewajiban suatu usaha atau kegiatan, seperti kelengkapan dokumen dan pengelolaan limbah B3 dengan benar.

Selanjutnya, dalam hal risiko bencana, RPJMD DIY Tahun 2017-2022 telah memasukkan 12 jenis bencana yang berisiko terjadi di 301 desa/kelurahan di wilayah DIY. Bencana tersebut meliputi kekeringan, banjir, gunung berapi, tsunami, hingga gempa bumi. Data Podes 2018 menunjukkan bahwa bencana banjir paling banyak dialami oleh desa dan kelurahan di DIY dengan 215 desa yang mengalami disusul bencana tanah longsor (117 desa) dan puting beliung (107 desa). Sementara wilayah yang paling banyak mengalami bencana adalah kabupaten Gunungkidul disusul Bantul dan Sleman.

4. Belum Optimalnya Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Tingginya Alih Fungsi Lahan Pertanian

Alih fungsi lahan rata-rata sebesar 0,40 persen pertahun selama kurun waktu 2002- 2015. Pada tahun 2016-2017, laju alih fungsi lahan meningkat menjadi 1,27 persen atau 3.069 hektar lahan pertanian di DIY dikonversi menjadi lahan non-pertanian. Salah satu penyebab alih fungsi lahan adalah semakin bertambahnya penduduk DIY yang berdampak pada kebutuhan lahan untuk pemukiman. Di samping itu, semakin banyaknya orang juga menyebabkan tumbuhnya berbagai usaha produktif yang juga membutuhkan lokasi produksi. Jika hal ini tidak ditekan semaksimal mungkin, lingkungan DIY akan menjadi rentan terhadap bencana.

Sejauh ini, Pemerintah DIY telah melakukan beberapa upaya preventif terhadap alih fungsi lahan pertanian. Salah satunya adalah melalui regulasi yang dituangkan dalam Peraturan Daerah DIY No. 10 Tahun 2011 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Menurut Peraturan

Daerah ini, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan daerah. Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di DIY adalah sebagai berikut:

1. Kabupaten Sleman dengan luas paling kurang 12.377,59 Ha;
2. Kabupaten Bantul dengan luas paling kurang 13.000 Ha;
3. Kabupaten Kulon Progo dengan luas paling kurang 5.029 Ha; dan
4. Kabupaten Gunung Kidul dengan luas paling kurang 5.505 Ha

Jika dijumlah, maka Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan mencapai 35.911,59 Ha atau sekitar 11,27 persen dari total luas wilayah DIY. Sementara itu, penataan ruang di DIY diatur dalam Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RT/RW) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009-2029. Di dalam Peraturan Daerah tersebut dijelaskan lokasi-lokasi yang diperuntukkan kegiatan bisnis, industri, pertanian, pemukiman, hingga budaya. Namun demikian, berdasarkan hasil pemantauan kesesuaian tata ruang yang dilakukan pada tahun 2017, kesesuaian penggunaan lahan di DIY terhadap pola ruang yang telah diatur dalam RTRW DIY hanya sebesar 64,79 persen, dengan tingkat kesesuaian paling tinggi pada kawasan cagar alam dan kawasan pertanian lahan kering. Hal ini menunjukkan bahwa pengendalian pemanfaatan ruang di DIY belum optimal.

5. Penyediaan Infrastruktur Dasar di Kawasan Pesisir Selatan Belum Optimal

Penyediaan infrastruktur dasar di kawasan pesisir selatan DIY diharapkan mampu mengurangi disparitas wilayah utara dan selatan. Sesuai dengan semangat among tani daganglayar, pembangunan pesisir selatan merupakan langkah konkrit semangat tersebut. Proyek strategis di wilayah DIY seperti NYIA di Kabupaten Kulon Progo dan JJLS di tiga kabupaten di DIY (Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunungkidul)

hendaknya mampu dimanfaatkan untuk mengembangkan penyediaan infrastruktur di kawasan pesisir selatan sehingga ketimpangan wilayah bisa berkurang.

Konsep *Transit Oriented Development* diharapkan mampu diterapkan dalam menyambut pembangunan NYIA yang dilengkapi kereta bandara. Nantinya di sekitar stasiun kereta bandara yang tersebar di beberapa titik mulai dari wilayah Kota Yogyakarta hingga Kabupaten Kulon Progo diharapkan dapat menumbuhkan kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat lokal. Hal ini sangat memungkinkan mengingat mobilitas penduduk semakin meningkat di titik-titik transit tersebut sehingga kesempatan bisnis juga semakin terbuka.

Agar manfaat keberadaan NYIA bisa optimal bagi masyarakat DIY, pembinaan terhadap pelaku usaha di berbagai sektor dan wilayah mutlak diperlukan. Berdasarkan studi yang dilakukan oleh Bank Indonesia (2019), secara umum kesiapan pelaku usaha di DIY masuk dalam kategori sedang/moderat dalam menghadapi operasional NYIA. Pelaku usaha yang bergerak di sektor Konstruksi dan Akomodasi makan minum cenderung lebih siap dalam menghadapi NYIA, sedangkan pelaku usaha di sektor Industri Pengolahan dan Perdagangan memiliki kesiapan yang lebih rendah. Tingkat kesiapan pelaku usaha di Kabupaten Kulonprogo, Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman cenderung lebih tinggi, sedangkan pelaku usaha di Kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunungkidul masih belum siap karena adanya kesenjangan ekonomi.

6. Pertumbuhan Ekonomi yang Belum Inklusif

Selama ini pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak menjamin semua orang memperoleh manfaat yang sama. Pertumbuhan yang tinggi belum menjamin peningkatan laju penurunan kemiskinan. Alih-alih, pertumbuhan ekonomi yang tinggi berpotensi meningkatkan ketimpangan ketika kue ekonomi hanya dinikmati sekelompok orang. Indeks Pertumbuhan Inklusif hadir untuk mengukur seberapa besar pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah dinikmati oleh masyarakatnya.

BPS DIY telah mengukur indeks pertumbuhan inklusif DIY tahun 2011-2015. Lima dimensi menjadi komponen pembentuk indeks tersebut yaitu pertumbuhan ekonomi, kemiskinan dan ketimpangan, kesetaraan gender, kapabilitas manusia, dan perlindungan sosial (BPS, 2016). Hasil penghitungan indeks tersebut adalah pertumbuhan ekonomi DIY sudah baik ditunjukkan dengan indeks sebesar 6,35 pada tahun 2015. Perbaikan masih diperlukan dalam hal program pengurangan kemiskinan, pengurangan ketimpangan, dan peningkatan tenaga kerja produktif. Masih adanya tenaga kerja yang dibayar dibawah UMP dan tingginya kemiskinan menjadi faktor penekan Indeks Pertumbuhan Inklusif.

Pada tahun 2018, Bappenas meluncurkan Indeks Pertumbuhan Inklusif nasional yang dihitung berdasarkan tiga pilar yaitu pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan, serta perluasan akses dan kesempatan. Penyusunan indeks ini dikatakan telah mengakomodasi kepentingan pembangunan Indonesia dan sesuai.

Dengan kondisi yang dihadapi Indonesia daripada komponen Indeks yang dikeluarkan oleh lembaga internasional. Nilai untuk DIY sudah memuaskan untuk semua pilar. Bahkan untuk pilar perluasan akses, nilai DIY adalah yang terbaik diantara provinsi yang lain yaitu 6,69. Hanya saja untuk pilar pemerataan pendapatan nilai DIY yang sebesar 6,63 masih lebih rendah dari nilai nasional yang sebesar 6,64.

Nilai Indeks Pembangunan Inklusif ini mengkonfirmasi dinamika pembangunan di DIY yang masih belum sepenuhnya dinikmati seluruh masyarakat khususnya golongan pendapatan rendah. Pembangunan di DIY ke depan diharapkan dapat dilakukan dengan lebih sensitif terhadap kondisi dan kebutuhan masyarakat miskin. Pada gilirannya pertumbuhan inklusif mampu mempercepat pengurangan kemiskinan dan mempersempit ketimpangan antar wilayah.

BAB III

RENCANA AKSI EKONOMI HIJAU DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2025 – 2029

A. Strategi, Kebijakan, Program Kegiatan dan Aktivitas Rencana Aksi Penerapan Ekonomi Hijau DIY

1. PILAR LINGKUNGAN

No	Indikator	OPD	Strategi	Kebijakan	Program/ Kegiatan	2025	2026	Target 2027	2028	2029
1	Persentase luas tutupan lahan dari luas daratan Daerah	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Melaksanakan pengelolaan hutan	Melakukan pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK);					
					AKTIVITAS : 1. Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	1 dokumen	1 dokumen	2 dokumen	dokumen	dokumen
				Melaksanakan perlindungan hutan	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara;					
					AKTIVITAS : 1. Pemanfaatan hutan produksi dan hutan lindung yang menjadi kewenangan	15581 ha	15581 ha	15581 ha		
					2. Pengembangan Hutan Rakyat	200 ha	250 ha	250 ha		

No	Indikator	OPD	Strategi	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Target				
						2025	2026	2027	2028	2029
					yang di Luar Kawasan Hutan Negara					
					3. Pengembangan Penghijaun Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	30 ha	30 ha	30 ha		
					4. Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan	7 unit	7 unit	7 unit		
					5. Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	400000 batang	400000 batang	400000 batang		
					6. Rehabilitasi Mangrove di Luar Kawasan Hutan	1 ha	1 ha	1 ha		
					Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi					
					AKTIVITAS :					
					1. Luas Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	15581 ha	15581 ha	15581 ha		
					2. Luas Kawasan Hutan yang	15581 ha	15581 ha	15581 ha		

No	Indikator	OPD	Strategi	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Target				
						2025	2026	2027	2028	2029
					Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan					
					3. Jumlah Laporan Patroli/Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	1 laporan	1 laporan	1 laporan		
					Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi					
					AKTIVITAS :					
				Melakukan pengelolaan Taman Hutan Rakyat (Tahura) Provinsi	1. Terlaksananya Pendampingan Pengelolaan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi < 6000 m3/Tahun	28 unit manajemen	28 unit manajemen	28 unit manajemen		
					2. Jumlah Unit Manajemen yang Melaksanakan Tertib Pelaporan RKOPHH untuk Pemegang PBPHH (Kayu dan HHBK) Skala Usaha Kecil dan Menengah	18 Unit Manajemen	23 Unit Manajemen	28 unit manajemen		
					3. Jumlah Dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen		

No	Indikator	OPD	Strategi	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Target					
						2025	2026	2027	2028	2029	
					Pelaksanaan, Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan HHBK) Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi						
		Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Pengaturan dan Pembinaan Penataan Ruang	Penyusunan Dokumen Rencana Tata Ruang	Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Daerah Istimewa Yogyakarta				1 dokumen		
				Penyiapan kebijakan teknis pengaturan dan pembinaan tata ruang	Penyusunan dan penyiapan bahan penetapan NSPK di Bidang Penataan Ruang	1 dokumen	1 dokumen				
				Penguatan kelembagaan penataan ruang daerah	Penyelenggaraan penataan ruang melalui Forum Penataan Ruang Daerah (FPRD) Daerah Istimewa Yogyakarta	1 dokumen					
				Penyebarluasan informasi penataan ruang	Penyebarluasan informasi penataan ruang	1 dokumen					
				Pembinaan penataan ruang	Pendampingan penyusunan	1 dokumen					

No	Indikator	OPD	Strategi	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Target				
						2025	2026	2027	2028	2029
				Kabupaten/Kota	Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota					
			Pelaksanaan dan Pengawasan Pemanfaatan Ruang	Sinkronisasi regulasi penataan ruang (vertikal dan horizontal)	Sinkronisasi regulasi penataan ruang (vertikal dan horizontal)	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen
				Mewujudkan keterpaduan pemanfaatan ruang antar wilayah dan sektoral	Mewujudkan keterpaduan pemanfaatan ruang antar wilayah dan sektoral	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen
				Mengefektifkan pemanfaatan pengendalian ruang sesuai dengan RTRW melalui monitoring dan evaluasi pemanfaatan ruang	Mengefektifkan pemanfaatan pengendalian ruang sesuai dengan RTRW melalui monitoring dan evaluasi pemanfaatan ruang	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen
				Penyusunan instrumen pengendalian pemanfaatan ruang	Penyusunan instrumen pengendalian pemanfaatan ruang	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen
				Memfasilitasi penyelesaian permasalahan penataan ruang	Memfasilitasi penyelesaian permasalahan penataan ruang	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen
				Pemanfaatan Ruang pada Satuan Ruang Strategis	Perwujudan pola ruang melalui penataan kawasan pada	Perwujudan pola ruang melalui penataan kawasan pada masing masing	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen

No	Indikator	OPD	Strategi	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Target				
						2025	2026	2027	2028	2029
			Kasultanan dan Kadipaten	masing masing satuan ruang strategis Kasultanan dan Kadipaten	satuan ruang strategis Kasultanan dan Kadipaten					
				Pewujudan Struktur ruang melalui pengembangan sarana prasarana pada masing-masing satuan ruang strategis Kasultanan dan Kadipaten	Pewujudan Struktur ruang melalui pengembangan sarana prasarana pada masing-masing satuan ruang strategis Kasultanan dan Kadipaten	1 dokumen				
				Pemantauan Pemanfaatan Ruang pada Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Pemantauan pemanfaatan ruang pada satuan ruang strategis Kasultanan dan Kadipaten	1 dokumen				
			Pengendalian Pemanfaatan Ruang pada Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Penyusunan instrumen pemberian insentif dan disinsentif kepada Pemerintah Kabupaten/Kota atau masyarakat untuk mendorong perwujudan pemanfaatan ruang sesuai	Penyusunan instrumen pemberian insentif dan disinsentif kepada Pemerintah Kabupaten/Kota atau masyarakat untuk mendorong perwujudan pemanfaatan ruang sesuai			2 dokumen		2 dokumen

No	Indikator	OPD	Strategi	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Target				
						2025	2026	2027	2028	2029
				dengan Rencana Tata Ruang	dengan Rencana Tata Ruang					
			Pemanfaatan, Penanganan Permasalahan, dan Pengawasan Pertanahan	Fasilitasi penetapan subjek dan objek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee lintas Kabupaten/ Kota	Penetapan subjek dan objek retribusi tanah lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi	1 dokumen				
		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY	Penanganan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B)	Peningkatan sektor pertanian dalam mendukung kesesuaian tata ruang	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang Aktifitas : 1. Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Merapi 2. Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu	2 dokumen				
2	Bauran energi baru terbarukan dari sumber	Dinas PUP & ESDM	Pengelolaan Energi terbarukan	Peningkatan penyediaan pemanfaatan enegi	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN Kegiatan: 1. Pengelolaan	56030 TOE	57030 TOE	58030 TOE	58030 TOE	58030 TOE

No	Indikator	OPD	Strategi	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Target				
						2025	2026	2027	2028	2029
	energi primer				aneka energi baru terbarukan sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi					
3	Persentase sampah terkelola	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Menyelenggarakan pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Melakukan pengumpulan limbah B3 lintas daerah Kabupaten/Kota	Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Aktivitas :					
					1. Fasilitasi Penyusunan Dokumen Pertek Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Dokumen Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3	1 dokumen				
					2. Koordinasi Pengelolaan Limbah B3 Kepada Kabupaten Kota dan/atau Pelaku Usaha/Kegiatan	1 dokumen				

No	Indikator	OPD	Strategi	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Target				
						2025	2026	2027	2028	2029
			Menyelenggara kan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Menangani sampah di TPA/TPST Regional	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
					Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional	0 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen
					Pemrosesan Akhir di TPA/TPST Regional	750 ton	350 ton	350 ton	600 ton	600 ton
					Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional	12 unit	13 unit	13 unit	13 unit	13 unit
					Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST regional	750 ton	350 ton	350 ton	600 ton	600 ton
					Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah Di TPA/TPST Regional	3 unit				
4	Persentase penurunan emisi kumulatif	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Menyelenggara kan pengendalian pencemaran dan/atau	Mencegah pencemaran dan/atau kerusakan	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen

No	Indikator	OPD	Strategi	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Target				
						2025	2026	2027	2028	2029
	dari baseline		kerusakan lingkungan hidup	lingkungan hidup	LINGKUNGAN HIDUP Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Aktivitas :					
					1. Inventarisasi Gas Rumah Kaca					
					2. Kajian Pembangunan Rendah Karbon					

No	Indikator	OPD	Strategi	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Target				
						2025	2026	2027	2028	2029
5	kualitas air permukaan - konsentrasi biological oxygen demand	Dinas PUP & ESDM dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Peningkatan kontribusi bagi warga negara terhadap akses sanitasi	Warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik regional	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah Kegiatan 1. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	36,71%	37,38%	38,05%	38,05%	38,05%
			Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	Pengurangan genangan di kawasan perkotaan dan strategis DIY	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase Kegiatan 1. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi	6,29 Ha	6,58 Ha	6,86 Ha	6,86 Ha	6,86 Ha

No	Indikator	OPD	Strategi	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Target				
						2025	2026	2027	2028	2029
				Memulihkan lingkungan dari pencemaran dan/atau kerusakan						
			Menyelenggarakan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Mencegah pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Sub Kegiatan Penghentian Pencemaran dan /kerusakan lingkungan hidup Aktivitas : 1. Pemetaan Penanganan Sungai Tercemar 2. Monitoring dan Evaluasi Jakstarada Pengelolaan Sampah	50 Titik				
					Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan	2 dokumen				

No	Indikator	OPD	Strategi	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Target					
						2025	2026	2027	2028	2029	
					Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut Aktivitas : 1. Data Pemantauan dan Evaluasi Kualitas Air Sungai di 10 Sungai 2. Data Pemantauan dan Evaluasi Kualitas Air Laut di 10 Titik Pantau						
					Menanggulangi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Penanggulangan Pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup					
6	Kualitas udara-konsentrasi nitrogen dioksida	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Menyelenggarakan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Menanggulangi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	1. Monitoring dan pemantauan udara (ISPU) PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP Kegiatan	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	

No	Indikator	OPD	Strategi	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Target				
						2025	2026	2027	2028	2029
					Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut Aktivitas : 1. Data Pemantauan dan Evaluasi Kualitas Udara Ambien di 20 Titik Pantau 2. Penyelenggaraan izin lingkungan (dokumen lingkungan)					
				Memulihkan lingkungan dari pencemaran dan/atau kerusakan	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	50 titik				
			Perwujudan Jalan	Penyediaan Layanan	PROGRAM PENYELENGGA	61,27%	64,49%	64,68%	64,68%	64,68%

No	Indikator	OPD	Strategi	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Target				
						2025	2026	2027	2028	2029
		Dinas Perhubungan DIY	Berkeselamatan Berbasis Angkutan Umum	Angkutan Umum di DIY	RAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)/ Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					
			Penerapan Teknologi Berbasis ITS (Intelligent Transportation System)	PROGRAM PENYELENGGA RAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)/ Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	46,77%	56,64%	66,77%	66,77%	66,77%	
			Pemenuhan SPM Layanan Tempat Khusus Parkir (TKP)	PROGRAM PENYELENGGA RAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)/ Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	82,46%	87,72%	90,35%	90,35%	90,35%	
			Pengelolaan Sektor Transportasi di	Perwujudan Angkutan Umum Ramah	PROGRAM PENYELENGGA RAAN	41,00%	51,50%	59,00%	59,00%	59,00%

No	Indikator	OPD	Strategi	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Target				
						2025	2026	2027	2028	2029
			Kawasan Strategis Dalam Mendukung Pelestarian Lingkungan	Lingkungan di Kawasan Strategis	KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG/ Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten					
				Penyediaan Moda Angkutan Tradisional di Kawasan Strategis	PROGRAM PENYELENGGA RAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG/ Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	68,13%	92,50%	95%	95%	95%
				Penyediaan Satuan Ruang Parkir di Tempat Khusus Parkir Pada Kawasan Strategis	PROGRAM PENYELENGGA RAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG/ Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	100%	100%	100%	100%	100%
				Pengendalian dan Pengawasan Lalu Lintas	PROGRAM PENYELENGGA RAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA	68,64%	71,68%	74,73%	74,73%	74,73%

No	Indikator	OPD	Strategi	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Target				
						2025	2026	2027	2028	2029
				Pada Kawasan Strategis	URUSAN TATA RUANG/ Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten					

2. PILAR EKONOMI

No	Indikator	OPD	Strategi	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Target				
						2025	2026	2027	2028	2029
1	PDRB per kapita	Dinas Pariwisata DIY	Pengembangan dan peningkatan daya saing Daya Tarik Wisata	Peningkatan daya saing destinasi dengan meningkatkan standar kualitas daya tarik wisata, aksesibilitas, dan amenities	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata Aktivitas: Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	50 usaha	50 usaha	50 usaha		
			Pengembangan Pasar dan Citra Pariwisata (tourism brand development)	1. Pengembangan pemasaran pariwisata yang tepat sasaran dan inovatif. 2. Mengoptimalkan dan memanfaatkan peran teknologi informasi dalam	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA Aktivitas: Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen		

No	Indikator	OPD	Strategi	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Target				
						2025	2026	2027	2028	2029
				mendukung pengembangan pasar dan citra pariwisata						
				3. Perumusan strategi pemasaran dan segmentasi pasar yang adaptif dan dapat merespon peluang di masa depan						
			Pengembangan produk dan pelaku ekonomi kreatif DIY Peningkatan kapasitas pelaku dan pengembangan produk ekonomi kreatif DIY yang bernilai tambah, kreatif dan berdaya saing serta fasilitasi sarana dan prasarana ekraf	Peningkatan kapasitas pelaku dan pengembangan produk ekonomi kreatif DIY yang bernilai tambah, kreatif dan berdaya saing serta fasilitasi sarana dan prasarana ekraf	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF Aktivitas: Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	50 orang	50 orang	50 orang		
		Dinas Perindustria	Penguatan Perdagangan	Peningkatan penggunaan	Fasilitasi pameran produk	4 event	4 event	4 event	4 event	4 event

No	Indikator	OPD	Strategi	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Target				
						2025	2026	2027	2028	2029
		n dan Perdagangan n DIY	Dalam Negeri melalui peningkatan penggunaan produk 5- 33ecto, pengelolaan persaingan usaha serta pengembangan pemasaran baik konvensional maupun online.	produk 5- 33ecto, pengelolaan persaingan usaha serta pengembangan pemasaran	IKM skala lokal/regional/n asional					
			Penguatan Perdagangan Dalam Negeri melalui kelancaran distribusi, dan stabilisasi harga	Peningkatan kelancaran distribusi, stabilisasi harga	Pasar murah dan operasi pasar	10 kali	10 kali	10 kali	10 kali	10 kali
			Memperkuat dan memperluas perdagangan internasional dalam upaya meningkatkan nilai ekspor DIY	Memperkuat dan memperluas perdagangan internasional dengan pengembangan kinerja perdagangan luar negeri dan fasilitas ekspor	Fasilitasi pameran skala ekspor	6 event	6 event	6 event	6 event	6 event
		Dinas Koperasi dan UKM DIY	Mengembangk an inovasi pada pembinaan	Pembinaan terhadap koperasi dan UKM	PROGRAM PEMBERDAYAA N DAN PERLINDUNGAN	25 Koperasi	25 Koperasi	25 Koperasi		

No	Indikator	OPD	Strategi	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Target				
						2025	2026	2027	2028	2029
			Koperasi dan UKM melalui offline maupun online yang mengarah pada digitalisasi bisnis dengan Klinik Koperasi	berdasarkan basis data di Sibakul Jogja	KOPERASI / Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Aktivitas : 1. Bimtek Tata Kelola Koperasi					
			Meningkatkan kualitas dan inovasi produk UKM agar dapat bersaing dengan produk asing.	Melaksanakan pembinaan dan sertifikasi produk UKM agar daya saing meningkat	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) / Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan Aktivitas : 1. Fasilitasi	30 UMKM	30 UMKM	30 UMKM		

No	Indikator	OPD	Strategi	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Target				
						2025	2026	2027	2028	2029
					Peningkatan Produktivitas UKM					
			Menciptakan kemitraan dalam rangka pemenuhan kebutuhan bahan baku dan pemasaran.	<ol style="list-style-type: none"> Melaksanakan promosi/pameran produk KUMKM DIY, melalui media yang inovatif. Melaksanakan Kemitraan antara KUMKM dengan Swasta dan BUMN. 	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) / Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan Aktivitas : 1. Fasilitasi Promosi dan Pemasaran	30 UMKM	30 UMKM	30 UMKM		
			Menghubungkan kemitraan pelaku Wirausaha	<ol style="list-style-type: none"> Melaksanakan Kemitraan antara Wirausaha Baru dengan Swasta dan BUMN dalam pemenuhan 	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN / Adat, Seni, Tradisi dan	30 Orang	30 Orang	30 Orang		

No	Indikator	OPD	Strategi	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Target				
						2025	2026	2027	2028	2029
				bahan baku dan pemasaran. 2. Melaksanakan Kemitraan Wirausaha Baru dengan Koperasi, Perbankan dan BUMN penyedia Modal. 3. Peningkatan kualitas dan inovasi produk wirausaha baru	Lembaga Budaya Aktivitas : 1. Pengembangan Potensi Kewirausahaan Desa					
2	Produktivitas pertanian	Dinas Kelautan dan Perikanan DIY	Peningkatan produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya	Peningkatan sarpras, penerapan iptek, dan pengembangan kawasan	Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT Aktivitas : - Sosialisasi Izin Usaha Perikanan Tangkap	10 rekomendasi	10 rekomendasi	10 rekomendasi		
					Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan Aktivitas :	2 unit	2 unit	2 unit		

No	Indikator	OPD	Strategi	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Target				
						2025	2026	2027	2028	2029
					- Operasional Pelabuhan Perikanan Pantai - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan - Perawatan Fasilitas Penunjang Pelabuhan Perikanan Pantai					
					Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di laut Aktivitas : - Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya	5 Kabupaten/Kota	5 Kabupaten/Kota	5 Kabupaten/Kota		
			Peningkatan daya saing produk kelautan dan perikanan	Meningkatkan kualitas hasil budidaya, tangkap dan produk.	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat Aktivitas : - Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila	7 unit	7 unit	7 unit		

No	Indikator	OPD	Strategi	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Target				
						2025	2026	2027	2028	2029
					Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota					
					Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar Aktivitas : -Pengujian Produk Hasil Perikanan - Pelatihan Alih Teknologi dan Informasi					
					Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1 tahun	1 tahun	1 tahun		

No	Indikator	OPD	Strategi	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Target				
						2025	2026	2027	2028	2029
					Aktivitas : - Pengawasan Terpadu di Perairan Umum Daratan					
				Mengembangkan sistem pemasaran yang modern	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	20 dokumen	20 dokumen	20 dokumen		
					Aktivitas : - Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi					
					Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah	5 rekomendasi	5 rekomendasi	5 rekomendasi		

No	Indikator	OPD	Strategi	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Target				
						2025	2026	2027	2028	2029
					Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Aktivitas : - Sosialisasi Unit Pengolahan Ikan (UPI) menuju Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) - Pembinaan Unit Pengolahan Ikan (UPI) menuju Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP)					
		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY	Meningkatkan produksi tanaman dan populasi ternak yang berdampak bagi peningkatan pendapatan petani;	Peningkatan dan pengamanan produksi, peningkatan mutu komoditas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan unggulan daerah berbasis sumber daya lokal secara ramah	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian 1. Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian 2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen

No	Indikator	OPD	Strategi	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Target				
						2025	2026	2027	2028	2029
				lingkungan dan berkelanjutan;	Pertanian 3. Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provins					
			Meningkatkan daya saing produk pertanian melalui standardisasi produk dan proses, peningkatan rantai pasok, mutu dan keamanan pangan;	Penguatan kelembagaan petani dan pemberdayaan petani dalam melakukan agribisnis produk unggul pertanian untuk meningkatkan akses petani terhadap faktor produksi, teknologi, informasi, pemasaran maupun akses permodalan sehingga dapat meningkatkan kualitas SDM petani;	Program Penyediaan dan Pengembangan PraSarana Pertanian 1. Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
					Program Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Vertenier 1. Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular 2. Pengawasan Peredaran Produk Hewan	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen

No	Indikator	OPD	Strategi	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Target				
						2025	2026	2027	2028	2029
					3. Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriksaan HPM 4. Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV)					
3	Intensitas Emisi	Dinas Perhubungan DIY	Perwujudan Jalan Berkeselamatan Berbasis Angkutan Umum	Penyediaan Layanan Angkutan Umum di DIY	PROGRAM PENYELENGGA RAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)/ Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	61,27%	64,49%	64,68%	64,68%	64,68%
				Penerapan Teknologi Berbasis ITS (Intelligent Transportation System)	PROGRAM PENYELENGGA RAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)/	46,77%	56,64%	66,77%	66,77%	66,77%

No	Indikator	OPD	Strategi	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Target				
						2025	2026	2027	2028	2029
					Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi					
				Pemenuhan SPM Layanan Tempat Khusus Parkir (TKP)	PROGRAM PENYELENGGA RAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)/ Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	82,46%	87,72%	90,35%	90,35%	90,35%
			Pengelolaan Sektor Transportasi di Kawasan Strategis Dalam Mendukung Pelestarian Lingkungan	Perwujudan Angkutan Umum Ramah Lingkungan di Kawasan Strategis	PROGRAM PENYELENGGA RAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG/ Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	41,00%	51,50%	59,00%	59,00%	59,00%
				Penyediaan Moda Angkutan Tradisional di Kawasan Strategis	PROGRAM PENYELENGGA RAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG/ Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis	68,13%	92,50%	95%	95%	95%

No	Indikator	OPD	Strategi	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Target				
						2025	2026	2027	2028	2029
					Kasultanan dan Kadipaten					
				Penyediaan Satuan Ruang Parkir di Tempat Khusus Parkir Pada Kawasan Strategis	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG/ Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	100%	100%	100%	100%	100%
				Pengendalian dan Pengawasan Lalu Lintas Pada Kawasan Strategis	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG/ Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	68,64%	71,68%	74,73%	74,73%	74,73%
4	Intensitas energi akhir	Dinas PUP & ESDM	konservasi dan diversifikasi energi serta pemerataan akses energi	Efektifitas penggunaan energi yang mendukung pertumbuhan ekonomi	1. program pengelolaan energi baru terbarukan 2. program pengelolaan ketenagalistrikan kegiatan: 1. penganggaran untuk kelompok	9,85 TOE/Milyar	9,5 TOE/Milyar	9,16 TOE/Milyar	9,16 TOE/Milyar	9,16 TOE/Milyar

No	Indikator	OPD	Strategi	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Target				
						2025	2026	2027	2028	2029
					masyarakat tidak mampu, pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik belum berkembang, daerah etrpencil dan perdesaan 2. penatausahaan izin operasi yang fasilitasnya dalam daerah provinsi 3. Pengelolaan aneka energi baru terbarukan sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi					
5	Produktivitas tenaga kerja sektor industri	Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY	Penguatan dan penumbuhan IKM Industri Kreatif melalui pengembangan aspek produksi, desain, pemasaran baik secara konvensional maupun	Pengembangan aspek SDM, produksi, desain dan pemasaran produk kreatif	- Bantuan hibah peralatan produksi ramah lingkungan bagi pelaku IKM - Penerapan alat tepat guna di sentra IKM potensial - Servis ATG (alat tepat guna) keliling	2 Paket 5 atg 36 kali				

No	Indikator	OPD	Strategi	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Target				
						2025	2026	2027	2028	2029
			online, dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual produk industri kreatif		Pelatihan peningkatan kapasitas pelaku IKM	23 akt	23 akt	23 akt	23 akt	23 akt
6	Produktivitas tenaga kerja sektor jasa	Dinas Koperasi dan UKM DIY	Menerapkan kurikulum untuk pembinaan KUMKM dengan optimal	Pembinaan terhadap koperasi dan UKM berdasarkan basis data di Sibakul Jogja	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN / Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	25 Koperasi	25 Koperasi	25 Koperasi		
					Aktivitas : 1. Pelatihan Perkoperasian PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA	25 UMKM	25 UMKM	25 UMKM		

No	Indikator	OPD	Strategi	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Target				
						2025	2026	2027	2028	2029
					MIKRO (UMKM) / Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan Aktivitas : 1. Pelatihan Peningkatan Keterampilan					

3. PILAR SOSIAL

No	Indikator	OPD	Strategi	Kebijakan	ProgramKegiatan	Target				
						2025	2026	2027	2028	2029
1	Rata-rata lama sekolah	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga	Peningkatan aksesibilitas pendidikan	Meningkatkan aksesibilitas pendidikan dengan memastikan bahwa fasilitas pendidikan mudah diakses bagi semua orang, termasuk peserta didik	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN/Ke giatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	169 Satuan Pendidika n	169 Satuan Pendidika n	169 Satuan Pendidika n	171 satuan pendidika n	171 satuan pendidika n
				Memperluas akses ke teknologi yang	PROGRAM PENUNJANG URUSAN	1 Tahun				

No	Indikator	OPD	Strategi	Kebijakan	ProgramKegiatan	Target				
						2025	2026	2027	2028	2029
				mendukung pembelajaran dan partisipasi dalam pendidikan	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
				Memberikan beasiswa atau bantuan operasional kepada satuan pendidikan dapat membantu mengurangi beban keuangan yang sering kali menjadi hambatan dalam aksesibilitas pendidikan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN/Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	28743 Peserta didik				
					PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN/Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	37845 Peserta didik				
					PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN/Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Khusus	10223 Peserta didik				
					PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN/Kegiatan	150 Orang	140 Orang	100 Orang	50 Orang	0 Orang

No	Indikator	OPD	Strategi	Kebijakan	ProgramKegiatan	Target				
						2025	2026	2027	2028	2029
					Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi					
				Meningkatkan kesadaran/advo kasi kepada masyarakat bahwa pendidikan bukan hanya tanggung jawab individu atau keluarga, namun juga tanggung jawab masyarakat dengan memberikan kesadaran kepada masyarakat tentang pentingnya pendidikan dan hak semua orang termasuk penyandang disabilitas untuk mendapatkan pendidikan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN/Ke giatan Pengelolaan Pendidikan Khusus	1 Dokumen				
				Penguatan pendataan	PROGRAM PENGELOLAAN	5 Dokumen				

No	Indikator	OPD	Strategi	Kebijakan	ProgramKegiatan	Target				
						2025	2026	2027	2028	2029
				terhadap anak usia sekolah yang tidak bersekolah sehingga dapat memberikan penanganan yang sesuai dengan kondisi anak	PENDIDIKAN/Ke giatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas					
				Fasilitasi terhadap perijinan pada pendirian satuan pendidikan menengah dan pendidikan khusus sehingga dapat meningkatkan aksesibilitas pendidikan dengan ketersediaan satuan pendidikan	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN/Ke giatan Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	1 Dokumen				
			Peningkatan capaian literasi dan numerasi	Pengembangan kompetensi bagi pendidik dan siswa dengan berbagai macam pelatihan, seperti pelatihan pengembangan bahan ajar, pelatihan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN/Ke giatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	40 orang				
					PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN/Ke	20 orang				

No	Indikator	OPD	Strategi	Kebijakan	ProgramKegiatan	Target				
						2025	2026	2027	2028	2029
				metode pembelajaran inovatif, dan pelatihan penguasaan teknologi informasi.	giatan Pengelolaan Pendidikan Khusus					
				Pengembangan bahan ajar yang inovatif dan menarik, sehingga siswa dapat lebih mudah memahami materi yang disampaikan.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN/Ke giatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	100 orang	100 orang	100 orang	100 orang	100 orang
					PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN/Ke giatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	100 orang	100 orang	100 orang	100 orang	100 orang
					PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN/Ke giatan Pengelolaan Pendidikan Khusus	81 orang	81 orang	81 orang	81 orang	81 orang
					Penerapan metode pembelajaran yang lebih interaktif dan partisipatif.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN/Ke giatan Pengelolaan Pendidikan	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen

No	Indikator	OPD	Strategi	Kebijakan	ProgramKegiatan	Target				
						2025	2026	2027	2028	2029
				Dengan memperkuat interaksi dan partisipasi siswa dalam proses pembelajaran, seperti penggunaan media pembelajaran interaktif dan pembentukan komunitas belajar	Sekolah Menengah Atas					
				Dengan memperkuat interaksi dan partisipasi siswa dalam proses pembelajaran, seperti penggunaan media pembelajaran interaktif dan pembentukan komunitas belajar	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN/Ke giatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	6 Dokumen				
			Peningkatan kualitas pendidikan	Pengembangan minat bakat peserta didik dengan penyelenggaraa n, pembinaan, dan keikutsertaan dalam kejuaraan dan lomba-lomba di berbagai bidang	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN/Ke giatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	2965 peserta didik				
					PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN/Ke giatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	1935 peserta didik				
					PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN/Ke giatan Pengelolaan	466 peserta didik				

No	Indikator	OPD	Strategi	Kebijakan	ProgramKegiatan	Target				
						2025	2026	2027	2028	2029
					Pendidikan Khusus					
				Menciptakan lingkungan sekolah yang inklusif dan non diskriminatif	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN/Ke giatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	5 Dokumen				
					PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN/Ke giatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	5 Dokumen				
					PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN/Ke giatan Pengelolaan Pendidikan Khusus	1 Dokumen				
				peningkatan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN/Ke giatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	49 Orang				
					PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN/Ke giatan	69 Orang				

No	Indikator	OPD	Strategi	Kebijakan	ProgramKegiatan	Target				
						2025	2026	2027	2028	2029
					Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					
					PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN/Ke giatan Pengelolaan Pendidikan Khusus	9 Orang				
				Pemerataan penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan melalui pemberian insentif dan pemetaan kebutuhan pendidik	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN/Ke giatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	257 orang				
					PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN/Ke giatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	469 orang				
					PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN/Ke giatan Pengelolaan Pendidikan Khusus	505 orang				
					PROGRAM PENDIDIK DAN	214 satuan				

No	Indikator	OPD	Strategi	Kebijakan	ProgramKegiatan	Target				
						2025	2026	2027	2028	2029
					TENAGA KEPENDIDIKAN /Kegiatan Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	pendidikan	pendidikan	pendidikan	pendidikan	pendidikan
2	Angka harapan hidup	Dinas Sosial DIY	Optimalisasi peran Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam pelayanan kesejahteraan sosial	Peningkatan kapasitas PSKS serta memperluas jejaring dan membangun sinergitas lintas sektor dalam mewujudkan pelayanan kesejahteraan sosial yang lebih baik	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	22,02	22,02	22,02	22,02	22,02
			Optimalisasi mitigasi bencana dan pemetaan daerah rawan bencana	Menyiapkan kesiapsiagaan masyarakat dan relawan bencana (pembentukan KSB, sarasehan keserasian sosial) dan perluasan jangkauan pelayanan oleh petugas perlindungan	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	61.03	61.36	61.36	61.36	61.36

No	Indikator	OPD	Strategi	Kebijakan	ProgramKegiatan	Target				
						2025	2026	2027	2028	2029
				sosial (tagana, tenaga pelopor perdamaian, tim kampung siaga)						
		Dinas Kesehatan DIY			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat					
					Persentase fasyankes terakreditasi	57.04 %	62.22 %	67.41 %		
					Persentase Keberhasilan Pengobatan TBC	86 %	87 %	88 %		
					Persentase ODHA minum ARV (ODHA on ARV)	63 %	64 %	65 %		
					Persentase Penderita DM mendapatkan pengobatan secara teratur	78	79	80		
					Persentase Wanita Usia Subur (WUS) yang melakukan deteksi dini iva test dan sadanis untuk pencegahan kanker servik dan kanker payudara	16	17	18		

No	Indikator	OPD	Strategi	Kebijakan	ProgramKegiatan	Target				
						2025	2026	2027	2028	2029
					Persentase Skrining/deteksi dini kesehatan jiwa pada usia 15 tahun ke atas	35	40	50		
					Persentase penderita ODGJ yang mendapatkan pelayanan secara standar	73	74	75		
					Persentase masyarakat miskin mendapat layanan jaminan kesehatan semesta	100	100	100		
					Penyediaan Fasilitas, Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	60	902	547		
					Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	0	1	1		
					Pengembangan Rumah sakit	1	0	0		
					Pengadaan Alat Kesehatan/Alat	10	0	25		

No	Indikator	OPD	Strategi	Kebijakan	ProgramKegiatan	Target				
						2025	2026	2027	2028	2029
					Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan					
					Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan	25	0	20		
					Pengadaan Prasarana	4	0	1		
				Fasilitas Layanan Kesehatan						
					Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-	8	9	9		
				Alat Kesehatan/Peralatan						
					Laboratorium Kesehatan	2	2	3		
				Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya						
				Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya						
				Pengelolaan						
						832000	840000	840000		

No	Indikator	OPD	Strategi	Kebijakan	ProgramKegiatan	Target				
						2025	2026	2027	2028	2029
					Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga					
					Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan					
					Penyediaan layanan kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM, dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	65	64	60		
					Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	3	4	5		
					Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	310	350	405		
			Fokus pada intervensi penurunan stunting	Optimalisasi konvergensi program untuk pencapaian penurunan stunting dengan pencapaian Indeks Keluarga Sehat dan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	9	9	9		

No	Indikator	OPD	Strategi	Kebijakan	ProgramKegiatan	Target					
						2025	2026	2027	2028	2029	
				Penguatan GERMAS							
		Dinas Kesehatan DIY	Fokus mendukung budaya dan kesesuaian tata ruang dengan upaya pengembangan kesehatan tradisional serta mengembangkan RS Grhasia menjadi RS penyangga layanan kesehatan di Kawasan Rawan Bencana Merapi	Optimalisasi pengembangan kesehatan tradisional di fasilitas pelayanan kesehatan dan komunitas serta optimalisasi pengembangan dan pembangunan RS Grhasia menjadi RS penyangga layanan kesehatan di Kawasan Rawan Bencana Merapi	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	310	350	405			
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan atau Berpotensi Bencana	438	438	438			
				Fokus pada pengarusutamaan gender dalam pelaksanaan pembangunan Kesehatan masyarakat	Optimalisasi pengarusutamaan gender pada pelaksanaan program dan kegiatan bidang kesehatan	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya manusia esehatan	1414	1475	1536		
						Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	4	5	5		
3	Tingkat kemiskinan	Dinas Pemberdayaan Perempuan	Meningkatkan pemberdayaan ekonomi perempuan	Pembentukan Kelompok Ekonomi Prodiktif Desa	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial,	14%	16%	17%			

No	Indikator	OPD	Strategi	Kebijakan	ProgramKegiatan	Target				
						2025	2026	2027	2028	2029
		Perlindungan Anak dan Pengendalian Pendudukan Daerah Istimewa Yogyakarta	melalui pembentukan dan pendampingan kelompok Ekonomi Produktif Desa Prima.	Prima baru di fokuskan di daerah tertinggal/miskin dan pendampingan secara berkelanjutan untuk menuju klasifikasi Desa Prima Maju.	dan Ekonomi pada Organisasi KeMasyarakatan Kewenangan Provinsi					
	Terwujudnya sumber daya manusia yang unggul melalui transmigrasi dan pemberdayaan masyarakat miskin		Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan ekonomi Kewenangan Propinsi		4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen			
	Meningkatkan kualitas calon transmigran		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi		30 organisasi	35 organisasi	40 organisasi			
	Meningkatkan aksesibilitas masyarakat miskin ntuk dapat membuka usaha									
		Meningkatkan kuantitas alokasi penempatan								
	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui transmigrasi dan	Persentase calon transmigrasi yang ditempatkan	Program Pembangunan kawasan transmigrasi						
				Penataan Persebaran Penduduk yang	20 KK	25 KK	30 KK			

No	Indikator	OPD	Strategi	Kebijakan	ProgramKegiatan	Target				
						2025	2026	2027	2028	2029
			pemberdayaan masyarakat		Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi					
			Mengembangkan enterprenurship yang berorientasi pada pengurangan angka kemiskinan	Penciptaan wira usaha baru melalui pelatihan, diklat, maupun fasilitasi udara						
		Dinas Sosial DIY	Meningkatkan kualitas pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar bagi penduduk miskin	Layanan Rehabilitasi Sosial dalam pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	22.58	22,7	22,7	22,7	22,7
				Memperluas Cakupan Layanan Perlindungan dan Jaminan Sosial melalui pemberdayaan Ekonomi dan Bantuan Sosial	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	3.67	3.68	3.68	3.68	3.68
		Disperindag DIY	Mengembangkan enterpreneurship yang berorientasi	Pengembangan Industri Kecil Menengah di Kapanewon Miskin melalui	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri/Penyus					

No	Indikator	OPD	Strategi	Kebijakan	ProgramKegiatan	Target				
						2025	2026	2027	2028	2029
			pada pengurangan angka kemiskinan	pelatihan, diklat, maupun fasilitasi usaha	unan, Penerapan, Dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi					
		Dinas Koperasi dan UKM DIY	Pemberdayaan Koperasi dan UKM dalam rangka mengurangi angka kemiskinan dan ketimpangan wilayah.	<p>1. Mengoptimalkan data grafis wilayah miskin untuk penguatan potensi lokal</p> <p>2. Penentuan Lokasi / peserta program kegiatan diprioritaskan pada kecamatan di wilayah miskin dan ketimpangan wilayah.</p> <p>3. Pembinaan terhadap koperasi dan UKM berdasarkan basis data di Sibakul Jogja</p> <p>4. Melaksanakan pembinaan dan sertifikasi produk UKM</p>	<p>PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) / Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan</p> <p>Aktivitas :</p> <p>1. Fasilitasi Peningkatan Produktivitas UKM</p> <p>2. Fasilitasi Promosi dan Pemasaran</p>	30 UMKM	30 UMKM	30 UMKM		

No	Indikator	OPD	Strategi	Kebijakan	ProgramKegiatan	Target				
						2025	2026	2027	2028	2029
				agar daya saing meningkat						
				5. Melaksanakan Kemitraan antara Wirausaha Baru dengan Swasta dan BUMN dalam pemenuhan bahan baku dan pemasaran.						
			Pemberdayaan Wirausaha Baru dalam rangka mengurangi angka kemiskinan dan ketimpangan wilayah.	1. Mengoptimalkan data grafis wilayah miskin untuk penguatan potensi lokal 2. Sosialisasi, Penumbuhan, dan Pengembangan Kewirausahaan 3. Pengembangan Enterprenurship pelaku Wirausaha Baru di wilayah miskin dan wilayah dengan ketimpangan pendapatan.	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN / Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Aktivitas : 1. Pengembangan Potensi Kewirausahaan Desa	30 Orang	30 Orang	30 Orang		

No	Indikator	OPD	Strategi	Kebijakan	ProgramKegiatan	Target				
						2025	2026	2027	2028	2029
4	Tingkat pengangguran terbuka	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY	Meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan, pemagangan, standarisasi kompetensi	Persentase lulusan pelatihan yang ditempatkan	Program Rehabilitasi Sosial					
					Program Perlindungan dan Jaminan Sosial					
					Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri/ Penyusunan, Penerapan, Dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi					
					PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA					
					Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	1200 orang	1200 orang	1200 orang		
					Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja	119 lembaga	127 lembaga	135 lembaga		
					Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Menengah	10 perusahaan	10 perusahaan	10 perusahaan		

No	Indikator	OPD	Strategi	Kebijakan	ProgramKegiatan	Target				
						2025	2026	2027	2028	2029
					Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi	10 dokumen	10 dokumen	10 dokumen		
					PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN					
					Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	9 dokumen	9 dokumen	9 dokumen		
			Meningkatnya Kesempatan Kerja		PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA					
					Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen		
					PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA					
					Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	7000 orang	7500 orang	8000 orang		
					Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) lebih dari 1	10 lembaga	10 lembaga	10 lembaga		
					(Satu) Daerah Kabupaten/ Kota					

No	Indikator	OPD	Strategi	Kebijakan	ProgramKegiatan	Target				
						2025	2026	2027	2028	2029
					Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen		
					Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di daerah Provinsi	25 orang	25 orang	25 orang		
			Meningkatnya layanan ketenagakerjaan	Jumlah Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, Struktur Skala Upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL					
					Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1(satu) DaerahProvinsi	210 perkara	250 perkara	250 perkara		
					Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)	1 SK	1 SK	1 SK	1 SK	1 SK
					PROGRAM PENGAWASAN					

No	Indikator	OPD	Strategi	Kebijakan	ProgramKegiatan	Target				
						2025	2026	2027	2028	2029
					KETENAGAKERJ AAN					
					Penyelenggaraan pengawasan Ketenagakerjaan	855 perusaha an	915 perusaha an	975 perusaha an		
		Dinas Koperasi dan UKM DIY	Pemberdayaan Wirausaha Baru dalam rangka mengurangi angka kemiskinan dan ketimpangan wilayah.	1. Mengoptimalka n data grafis wilayah miskin untuk penguatan potensi lokal 2. Sosialisasi, Penumbuhan, dan Pengembangan Kewirausahaan 3. Pengembangan Enterprenurshi p pelaku Wirausaha Baru di wilayah miskin dan wilayah dengan ketimpangan pendapatan.	PROGRAM PENYELENGGA RAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN / Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Aktivitas : 1. Pengembangan Potensi Kewirausahaan Desa	30 Orang	30 Orang	30 Orang		

B. STRATEGI, KEBIJAKAN DAN PROGRAM PENERAPAN EKONOMI HIJAU DI DIY

1. PILAR LINGKUNGAN

No	Indikator	Unit	Formula	Program dan aktivitas	OPD
1	Persentase luas tutupan lahan dari luas daratan Daerah	%	Total luas tutupan hutan primer, sekunder, dan hutan tanaman / total luas daratan x 100%	<ul style="list-style-type: none"> a. Mempertahankan dan memperluas RTH, jalur hijau lahan pertanian dan hutan. b. Melakukan reklamasi hijau pada bekas pertambangan yang tidak dikelola c. Rehabilitasi hutan dan lahan kritis d. Menggalakan konsep eko green pada berbagai pemanfaatan lahan seperti ekowisata pada bidang pariwisata (pengembangan Jasa Lingkungan Wisata Alam) e. Memperkuat perizinan pemanfaatan ruang sesuai dengan tata ruang yng ditetapkan. f. Pengendalian Pengolahan dan Peredaran Hasil Hutan g. Rehabilitasi Daerah Tangkapan Air h. Pengelolaan DAS i. Operasi Pengamanan Hutan Partisipatif j. Pencegahan dan Pengamanan Hutan k. Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan l. Konservasi dan Sumber Daya Alam Hayati m. Penegakan Hukum 	<ul style="list-style-type: none"> a. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, b. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, c. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY

No	Indikator	Unit	Formula	Program dan aktivitas	OPD
2	Bauran energi baru terbarukan dari sumber energi primer	%	Jumlah pasokan energi primer (energi yang diberikan oleh alam dan belum mengalami proses pengolahan lebih lanjut) yang berasal / total keseluruhan pasokan energi primer x 100%	<ul style="list-style-type: none"> a. Investasi swasta untuk mendorong pencapaian target kontribusi b. EBT dalam Bauran Energi daerah c. Pemerintah memberikan insentif baik fiskal maupun non fiskal d. kepada pengembang untuk meningkatkan investasi di bidang EBT e. Komitmen pemerintah untuk Optimalisasi kegiatan riset f. (penelitian) dan pengembangan di bidang EBT. g. implementasi rooftop solar program (PLTS Atap) h. mendorong penggunaan energi hijau untuk mendukung sektor perikanan dan pertanian 	Dinas PUP & ESDM
3	Persentase sampah terkelola	%	Volume sampah yang ditangani /Volume produksi sampah x 100%	<ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan desentralisasi pengolahan sampah secara mandiri di Tempat Pengolahan Sampah Reduce Reuse Recycle (TPS 3R) b. Mengelola sampah salah menjadi Refused Derived Fuel (RDF) bahan bakar alternatif. c. Pengolahan sampah menggunakan teknologi tepat guna pengolahan sampah seperti teknologi incenerator, recycling, dan composting d. Pemberdayaan berbagai lapisan masyarakat untuk mengelola sampah secara mandiri sekaligus meningkatkan ekonomi (bank sampah, buddaya maggot dll) 	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

No	Indikator	Unit	Formula	Program dan aktivitas	OPD
				e. Penyediaan insentif dan disinsentif terhadap para pihak yang mampu mengelola sampah dengan baik ataupun yang melanggar kebijakan persampahan	
4	Persentase penurunan emisi kumulatif dari baseline	%	total penurunan emisi GRK/ emisi base line x 100%	<ul style="list-style-type: none"> a. Pembangunan Rendah Karbon pada sektor pertanian dengan yaitu pengelolaan lahan sawah, penggunaan pupuk organik dan biogas untuk menyerap emisi GRK, dan perbaikan pakan ternak melalui pakan hijau dan konsentrat dll. b. Penggunaan Sumber Energi Terbarukan c. Menghemat Penggunaan Energi Listrik d. Ubah Penggunaan Pupuk Kimia Menjadi Pupuk Organik e. Mengolah Limbah dari Peternakan f. Pengelolaan sampah terpadu g. Melakukan Sertifikasi ISO 14065 bagi Perusahaan h. Implementasi sistem transportasi rendah karbon dan berkelanjutan 	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
5	kualitas air permukaan-konsentrasi biological oxygen demand	mg/l	Nilai konsentrasi BOD hasil pengukuran	<ul style="list-style-type: none"> a. Menjaga dan meningkatkan kualitas air dan dan mengendalikan pencemaran air b. Menerbitkan aturan dan larangan membuang sampah dan limbah, baik ke sungai maupun ke lautan. c. Pemantauan kualitas air secara konsisten 	<ul style="list-style-type: none"> a. Dinas PUP & ESDM, b. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

No	Indikator	Unit	Formula	Program dan aktivitas	OPD
				d. Penerapan IPAL dan sejenisnya untuk industri, IPAL terpadu untuk permukiman	
6	Kualitas udara-konsentrasi nitrogen dioksida	µg/m ³	Nilai konsentrasi pengukuran kualitas udara NO ₂	<ul style="list-style-type: none"> a. Menjaga dan mengelola kualitas udara dan mengendalikan pencemaran udara b. Peningkatan hutan kota atau RTH c. Strategi pengelolaan transportasi umum d. Pengawasan dan pemantauan kualitas udara pada berbagai industri e. Penggunaan bahan bakar rendah karbon f. Mengelola sampah tanpa pembakaran 	Dinas Perhubungan DIY

2. PILAR EKONOMI

No	Indikator	Unit	Formula	Program dan aktivitas	OPD
1	PDRB per kapita	Juta upiah atau USD/kapit a	Jumlah Produk Domestik Regional Bruto suatu daerah / total jumlah penduduk yang tinggal	Program peningkatan nilai tambah ekonomi dalam berbagai sektor seperti sektor pariwisata, pertanian, kelautan, perindustrian, pertambangan dll	<ul style="list-style-type: none"> a. Dinas Pariwisata DIY, b. Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY
2	Produktivitas pertanian	Ton /Ha /tahun	Jumlah produksi (padi,ikan) selama setahun/luas area (sawah padi, budidaya perikanan)	<ul style="list-style-type: none"> a. Pemilihan varietas unggul b. Pemupukan yang tepat c. Pengendalian hama dan penyakit d. Pengolahan pasca panen e. Penggunaan teknologi baru f. Penerapan sertifikasi dan standar kualitas 	<ul style="list-style-type: none"> a. Dinas Kelautan dan Perikanan DIY, b. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY

No	Indikator	Unit	Formula	Program dan aktivitas	OPD
				<ul style="list-style-type: none"> g. Penggunaan benih berkualitas h. Diversifikasi pertanian i. Pengembangan jalan, irigasi, dan fasilitas pendukung lainnya untuk meningkatkan aksesibilitas kawasan pertanian j. Melakukan revitalisasi industri pengolahan ikan dengan benar sehingga ikan yg diolah memiliki daya jual tinggi. k. Meningkatkan produktivitas ekonomi kemaritiman dan perikanan dengan memberi sanksi yg tegas terhadap pelaku penangkapan ikan secara illegal. 	
3	Intensitas emisi	Ton CO2e/ milyar Rupiah konstan 2010	Jumlah seluruh emisi gas CO2e/PDRB pada tahun tersebut		Dinas Perhubungan DIY
4	Intensitas energi akhir	BOE/milya r Rupiah konstan 2010	Jumlah konsumsi energi final/PDRB		Dinas PUP & ESDM
5	Produktivitas tenaga kerja sektor industri	milyar Rupiah	Jumlah PDRB sektor industri pada tahun tertentu/jumlah tenaga	a. Pelatihan dan pembinaan tenaga kerja secara terpadu dan intensif	1. Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY

No	Indikator	Unit	Formula	Program dan aktivitas	OPD
		konstan 2010/orang	kerja sektor industri pada tahun tertentu	<ul style="list-style-type: none"> b. Pemanfaata teknologi baru yang efisien dan tepat guna c. Penerapan sistem produksi bersih untuk produktifitas sektor industri 	
6	Produktivitas tenaga kerja sektor jasa	milyar Rupiah konstan 2010/orang	Jumlah PDRB sektor jasa pada tahun tertentu/jumlah tenaga kerja sektor jasa	<ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan pembenahan di dalam sistem pendidikan. Artinya, sistem pendidikan harus terkoneksi dan mampu beradaptasi dengan potensi dan dinamika sektor ekonomi yang ada. b. Melakukan perbaikan kualifikasi dan spesialisasi pendidikan maupun keterampilan oleh lembaga pelatihan tenaga kerja sesuai dengan standar dan benar-benar dibutuhkan oleh perusahaan atau pasar kerja baik industri maupun jasa yang sedang berkembang di DIY c. Menata ulang program-program peningkatan pendidikan dan pelatihan yang sudah ada dengan bekerjasama dengan stakeholder lainnya dalam pembinaan dan pengembangan kapasitas SDM. d. Mengoptimalkan fungsi dan peran lembaga-lembaga pendidikan dan pelatihan DIY yang ada dalam 	Dinas Pendidikan , Pemuda dan Olahraga DIY Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

No	Indikator	Unit	Formula	Program dan aktivitas	OPD
				<p>menghasilkan tenaga kerja yang berkualitas dan berdaya saing.</p> <p>e. Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung pendidikan dan pelatihan tenaga kerja dari sisi kuantitas dan kualitasnya.</p> <p>f. Melakukan evaluasi terhadap program pendidikan dan pelatihan pengembangan kapasitas SDM baik yang sedang dan telah dilakukan secara berkala sehingga dapat diukur dampaknya dalam mendukung pembangunan ekonomi.</p>	

3. PILAR SOSIAL

No	Indikator	Unit	Formula	Program dan aktivitas	OPD
1	Rata-rata lama sekolah	tahun	<p>a. Untuk menghitung RLS dibutuhkan informasi:</p> <p>b. Partisipasi sekolah</p> <p>c. Jenjang dan jenis pendidikan yang pernah/sedang diduduki</p> <p>d. Ijasah tertinggi yang dimiliki</p> <p>e. Tingkat/kelas tertinggi yang pernah/sedang diduduki. Cakupan penduduk yang dihitung RLS adalah penduduk usia 25 tahun ke</p>	<p>a. Menambah jumlah guru/tenaga pendidik yang berkompeten, berkualitas dan profesional.</p> <p>b. Melatih dan sertifikasi guru</p> <p>c. Memberikan tambahan tunjangan guru</p> <p>d. Merehabilitasi dan melengkapi fasilitas sekolah</p> <p>e. Membangun sekolah baru</p>	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga

			<p>atas dengan asumsi pada umur 25 tahun proses pendidikan sudah berakhir.</p> <p>RLS : jumlah tahun belajar penduduk umur ≥ 25 tahun yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang).</p>	f. Menjamin aksesibilitas lokasi sekolah	
2	Angka harapan hidup	tahun	AHH = jumlah umur semua orang yang meninggal suatu daerah / jumlah orang yang meninggal pada tahun tersebut	<p>a. Memperbaiki perencanaan pembangunan kesehatan yang bersifat menyeluruh</p> <p>b. Peningkatan alokasi anggaran yang tepat sasaran, tepat waktu dan tepat jumlah disertai dengan pengawasan pelaksanaannya dengan fokus utama menurunkan tingkat kematian.</p> <p>c. Meningkatkan kerjasama kesehatan dengan pihak swasta</p> <p>d. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota dalam upaya meningkatkan kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan</p>	Dinas Sosial DIY, Dinas Kesehatan DIY

				<p>serta melakukan pemerataan dalam distribusi tenaga kesehatan</p> <p>e. Meningkatkan promosi perilaku hidup sehat dalam masyarakat dan menciptakan lingkungan sehat serta mengikutsertakan SDM kesehatan dalam pendidikan dan pelatihan (diklat) terkait pengelolaan anggaran.</p> <p>f. Memanfaatkan sarana prasarana kesehatan yang dimiliki untuk meningkatkan daya jangkau masyarakat terutama yang dapat menurunkan tingkat kematian ibu dan bayi.</p>	
3	Tingkat kemiskinan	%	TK = Jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan pada waktu tertentu / jumlah penduduk seluruhnya pada periode waktu yang sama	a. Peningkatan pendapatan masyarakat: Ini dapat dilakukan dengan program-program pemberdayaan masyarakat dan UMKM, seperti pemberian sarpras UMKM, kelompok usaha bersama, Usaha Peningkatan Pendapatan Akseptor (UPPKA),	a. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta,

				<p>bantuan ternak dan ikan, dan pelatihan kewirausahaan.</p> <p>b. Pengurangan kantong-kantong kemiskinan: Ini dapat dilakukan dengan meningkatkan akses layanan dasar dan konektivitas antar wilayah, seperti pembangunan sekolah, puskesmas/pustu, dan jalan</p> <p>c. Meningkatkan pendapatan seperti peningkatan akses permodalan, peningkatan kualitas produk dan akses pemasaran, pengembangan keterampilan dan layanan usaha, serta pengembangan kewirausahaan, kemitraan, dan keberantaraan.</p>	<p>b. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY, Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY,</p> <p>c. Dinas Sosial DIY,</p>
4	Tingkat pengangguran terbuka	%	$TPT = \frac{\text{Jumlah Pengangguran}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}} \times 100\%$	<p>a. Pendidikan dan pelatihan: Melakukan pelatihan kerja, magang, dan praktik kerja. Pelatihan dapat membantu masyarakat dengan pendidikan rendah atau pengalaman kerja yang kurang. Masyarakat yang</p>	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY

				<p>telah lulus dari pelatihan dapat berbagi ilmu dengan yang belum lulus.</p> <p>b. Peningkatan wirausaha: Mendorong sektor wirausaha di masyarakat. Ini dapat dilakukan dengan memberikan edukasi tentang semangat berwirausaha, workshop usaha, dan pinjaman modal usaha.</p> <p>c. Informasi lowongan kerja: Menyediakan informasi akurat tentang lapangan pekerjaan dan lowongan kerja. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dapat berperan dalam penyediaan informasi ini.</p> <p>d. Kerja sama dengan perusahaan: Meningkatkan kerja sama dengan perusahaan di daerah maupun luar daerah.</p> <p>e. Pemanfaatan teknologi: Menerapkan teknologi, seperti membuka online shop, untuk mengikuti perkembangan zaman.</p>	
--	--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

				<ul style="list-style-type: none"> f. Sosialisasi: Melakukan sosialisasi tentang perkembangan teknologi. g. Perpindahan tempat tinggal: Melakukan perpindahan tempat tinggal. h. Peningkatan standar gaji: Menaikkan standar gaji UMR (Upah Minimum Regional 	
--	--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

C. TARGET INDIKATOR MAKRO PADA RENCANA AKSI EKONOMI HIJAU DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2025 – 2029

1. PILAR LINGKUNGAN

No	Indikator	Unit	Formula	Base Line (2021)	Target					OPD
					2025	2026	2027	2028	2029	
1.	Persentase luas tutupan lahan dari luas daratan Daerah	%	Total luas tutupan hutan primer, sekunder, dan hutan tanaman / total luas daratan x 100%	31,37	35.07	35.10	35.14	35.17	35.20	a. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, b. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, c. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY

No	Indikator	Unit	Formula	Base Line (2021)	Target					OPD
					2025	2026	2027	2028	2029	
2.	Bauran energi baru terbarukan dari sumber energi primer	%	Jumlah pasokan energi primer (energi yang diberikan oleh alam dan belum mengalami proses pengolahan lebih lanjut) yang berasal / total keseluruhan pasokan energi primer x 100%	6,44	6,60	6,69	6,78	6,88	6,97	Dinas PUP & ESDM
3.	Persentase penurunan emisi kumulatif dari baseline	%	total penurunan emisi GRK/ emisi base line x 100%	44,59	4,06	5,07	6,08	7,09	8,09	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
4.	kualitas air permukaan-konsentrasi <i>biological oxygen demand</i>	mg/l	Nilai konsentrasi BOD hasil pengukuran	2,77	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	a. Dinas PUP & ESDM, b. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
5.	Kualitas udara-konsentrasi nitrogen dioksida	µg/m3	Nilai konsentrasi pengukuran kualitas udara NO2	11,89	11,20	11,18	11,16	11,14	11,12	Dinas Perhubungan DIY

2. PILAR EKONOMI

No	Indikator	Unit	Formula	Base Line (2021)	Target					OPD
					2025	2026	2027	2028	2029	
1.	PDRB perkapita	Juta upiah atau USD/kapita	Jumlah Produk Domestik Regional Bruto suatu daerah / total jumlah penduduk yang tinggal	107.308,555	52.88	55.45	58.25	61.28	64.59	<ul style="list-style-type: none"> a. Dinas Pariwisata DIY, b. Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY c. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY d. Dinas kelautan dan Perikanan DIY e. Dinas Koperasi dan UMKM f. Dinas Perizinan dan Penanaman Modal

No	Indikator	Unit	Formula	Base Line (2021)	Target					OPD
					2025	2026	2027	2028	2029	
2.	Produktivitas pertanian	Ton/Ha/tahun	Jumlah produksi (padi,ikan) selama setahun/luas area (sawah padi, budidaya perikanan)							a. Dinas Kelautan dan Perikanan DIY, b. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY
	a. Produktivitas Pertanian Padi	Ton/Ha/tahun	Jumlah produksi padi/Luas area padi	5,96	5,20	5,25	5,30	5,35	5,40	
	b. Produktivitas Perikanan Budidaya	Ton/Ha/tahun	Jumlah Produksi perikanan Budidaya/ Luas area perikanan budidaya	67,14	76,70	77,20	77,70	78,20	78,70	

No	Indikator	Unit	Formula	Base Line (2021)	Target					OPD
					2025	2026	2027	2028	2029	
3.	Intensitas emisi	Ton CO2e/ milyar Rupiah konstan 2010	Jumlah seluruh emisi gas CO2e/PDRB pada tahun tersebut	2.85	62,14	63,82	65,51	67,19	68,88	a. Dinas Perhubungan DIY b. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan c. Dinas PUP & ESDM
4.	Intensitas energi akhir	BOE/mil yar Rupiah konstan 2010	Jumlah konsumsi energi final/PDRB	11,45	9,85	9,5	9,158	8,812	8,466	Dinas PUP & ESDM

No	Indikator	Unit	Formula	Base Line (2021)	Target					OPD
					2025	2026	2027	2028	2029	
5.	Produktivitas tenaga kerja sektor industri	milyar Rupiah konstan 2010/ora ng	Jumlah PDRB sektor industri pada tahun tertentu/juml ah tenaga kerja sektor industri pada tahun tertentu	32.103.0 40,18	49.447. 312,31	51.425. 204,80	53.482.2 12,99	55.621 .501,5 1	57.846. 361,57	a. Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY b. Dinas Pendidikan , Pemuda dan Olahraga DIY c. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi d. Dinas Koperasi dan UMKM
6.	Produktivitas tenaga kerja sektor jasa	milyar Rupiah konstan 2010/ora ng	Jumlah PDRB sektor jasa pada tahun tertentu/juml ah tenaga kerja sektor jasa	55.672.1 82,49	64.748. 499,33	67.985. 924,30	71.385.2 20,51	74.954 .481,5 4	78.702. 205,62	a. Dinas Pendidikan , Pemuda dan Olahraga DIY b. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

3. PILAR SOSIAL

No	Indikator	Unit	Formula	Base Line (2021)	Target					OPD
					2025	2026	2027	2028	2029	
1	Rata-rata lama sekolah	tahun	<p>Untuk menghitung RLS dibutuhkan informasi:</p> <p>a. Partisipasi sekolah</p> <p>b. Jenjang dan jenis pendidikan yang pernah/sedang diduduki</p> <p>c. Ijasah tertinggi yang dimiliki</p> <p>d. Tingkat/kelas tertinggi yang pernah/sedang diduduki.</p> <p>Cakupan penduduk yang dihitung RLS adalah penduduk usia 25 tahun ke atas dengan asumsi pada umur 25 tahun proses</p>	9,64	9,99	10,07	10,15	10,23	10,31	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga

No	Indikator	Unit	Formula	Base Line (2021)	Target					OPD
					2025	2026	2027	2028	2029	
			pendidikan sudah berakhir. RLS : jumlah tahun belajar penduduk umur ≥25 tahun yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang).							
2	Angka harapan hidup	tahun	AHH = jumlah umur semua orang yang meninggal suatu daerah / jumlah orang yang meninggal pada tahun tersebut	75,04	75.21	75.24	75.27	75,30	75,33	a. Dinas Sosial DIY, b. Dinas Kesehatan DIY
3	Tingkat kemiskinan	%	TK = Jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan pada waktu tertentu / jumlah penduduk seluruhnya pada	12,08	9,66	9,16	8,66	8,04	7,11	c. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk

No	Indikator	Unit	Formula	Base Line (2021)	Target					OPD
					2025	2026	2027	2028	2029	
			periode waktu yang sama							Daerah Istimewa Yogyakarta, d. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY, e. Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY, f. Dinas Sosial DIY.
4	Tingkat pengangguran terbuka	%	$TPT = \frac{\text{Jumlah Pengangguran} \times 100\%}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}}$	4,56	3,12	3,11	2,95	2,81	2,76	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY

GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGGU BUWONO X

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Biro Hukum,



Hary Setiawan, S.H., M.H.